

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 11
November 2019



NARASI JITU INDONESIA MAJU

PROF. DR. WIDODO MUKTIYO ——— DIRJEN IKP KEMKOMINFO

Pengarah
Menteri Komunikasi
dan Informatika RI

Pembina
Sekretaris Jenderal
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika RI

**Penanggung Jawab &
Pemimpin Redaksi**
Ferdinandus Setu

**Redaktur
Pelaksana**
M. Taufiq Hidayat

Redaktur
Frans Bambang Irawan,
Daoni Diani Hutabarat,
Verawati, Helmi Fajar
Andrianto, Viskayanesya

Reporter
Patricia Samantha
Silalahi, Annisa
Bonita P., Yusuf,
Tommy Tirtawiguna

Fotografer
Agus Yudi Harsono,
Doni Paulus Sumule,
Sri Indrati Novinarsari

Desain & Layout
Adista Winda Rizka,
Rahma Aulia Indroputri,
Lamdza Rahmattunnisa

Produksi & Sirkulasi
Fahmie Trihatin Januarsyah

INFRASTRUKTUR YANG KITA BANGUN BERLEVEL "LANGIT"

Salah satu pesan estafet dari Menteri Rudiantara dan para pejabat Kominfo saat pertama kali menginjakkan kaki di kementerian ini, yang masih terngiang di telinga saya, adalah tentang urgensi program satelit. Saya dengar bahwa meskipun sudah siap dengan program satelit Satria, kita masih membutuhkan tambahan beberapa satelit baru untuk bisa mencakup seluruh wilayah Tanah Air dengan akses internet yang memadai, tidak sekedar ada.

Baru-baru ini kita mendapat kabar gembira bahwa kita berhasil memperjuangkan perpanjangan penggunaan tiga slot orbit satelit kita, yaitu Palapa-C1-B (113 BT), Garuda-2 (123 BT), dan PSN-146E (146 BT) di Forum World Radiocommunication Conference (WRC). Pencapaian ini sangat penting bagi kita karena akan dimanfaatkan untuk menempatkan dan mengoperasikan satelit untuk mendukung program penyediaan layanan komunikasi broadband bagi masyarakat Indonesia.

Filing satelit PALAPA-C1-B di slot orbit 113BT akan digunakan untuk menempatkan satelit Nusantara Dua yang akan diluncurkan tahun 2020. Filing satelit PSN-146E di slot orbit 146BT akan digunakan untuk menempatkan satelit SATRIA milik BAKTI Kemkominfo yang akan diluncurkan pada tahun 2023 untuk memberikan layanan broadband

untuk masyarakat Indonesia di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sedangkan filing satelit GARUDA-2 di slot orbit 123BT akan digunakan untuk menempatkan satelit yang akan memberikan layanan telepon satelit yang akan diluncurkan pada tahun 2024. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia untuk mendapatkan perpanjangan waktu regulatori filing satelit Indonesia tersebut sangat strategis bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk akses telekomunikasi terutama di daerah-daerah 3T. Kalau gagal mendapatkan persetujuan Sidang WRC-19, maka Indonesia tidak dapat menempatkan satelit barunya menggunakan filing tersebut. Sementara mengusahakan filing baru di slot orbit tersebut sudah sangat sulit karena kepadatan slot orbit geosynchronous (GSO) saat ini, belum lagi dengan tambahan waktu dan energi yang harus kita siapkan lagi.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan yang Indonesia-sentris saat ini harus kita utamakan untuk menebus kekurangan-kekurangan kita di masa lalu yang sering mengabaikan daerah-daerah 3T. Saya rasa Kominfo mendapatkan anugerah berupa amanah yang luar biasa untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan seluruh pelosok Indonesia secara adil melalui pembangunan akses telekomunikasi dan internet.

Selain sebagai menteri, saya juga adalah putra daerah, juga pernah sebagai anggota legislatif yang memiliki konstituen di daerah yang masih sangat berkekurangan dalam berbagai hal. Oleh sebab itu saya bisa merasakan kebutuhan mendesak akan infrastruktur mendasar era kini, yaitu telekomunikasi. Saya yakin teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi batu loncatan yang tepat bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah-daerah 3T.

Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim SDPPI, Pak Ismail dan Pak Denny beserta segenap jajarannya, yang saya tahu telah bekerja sangat keras untuk “menggolkan” proposal ini. Meski saya hanya berkesempatan ikut terjun pada ujung prosesnya, namun saya bisa merasakan keras dan rumitnya perjuangan tim ini, yang selain harus meyakinkan panel WRC, juga harus melobi negara-negara tetangga yang terdampak, seperti Australia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Malaysia, Luksemburg, Inggris, Perancis, Jepang, Republik Korea, Belanda, India, dan Papua Nugini.

Mungkin banyak orang tak merasakan, namun Kominfo sejatinya adalah salah satu kementerian yang paling depan dalam membangun infrastruktur. Hanya saja memang infrastruktur yang kita bangun kadang tak kasat mata. Orang bisa menikmati akses internet yang ngebut tanpa perlu mengetahui letak dan wujud peranti yang memasoknya, apakah itu BTS, hotspot, atau (apalagi) jaringan serat optik. Infrastruktur kita bersifat “langit”. Kita melayani tanpa harus banyak diketahui. Semoga justru itu yang selalu menjadi kebanggaan kita.***

Johnny G. Plate
Menteri Komunikasi
dan Informatika RI



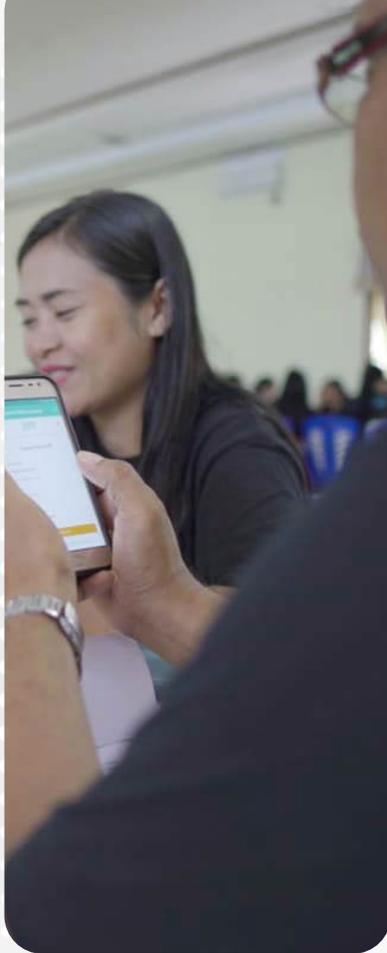


01
PERSPEKTIF MENTERI

04
SURAT DARI MMB 9

06
TEKNOLOGI & GADGET

09
RESENSI BUKU

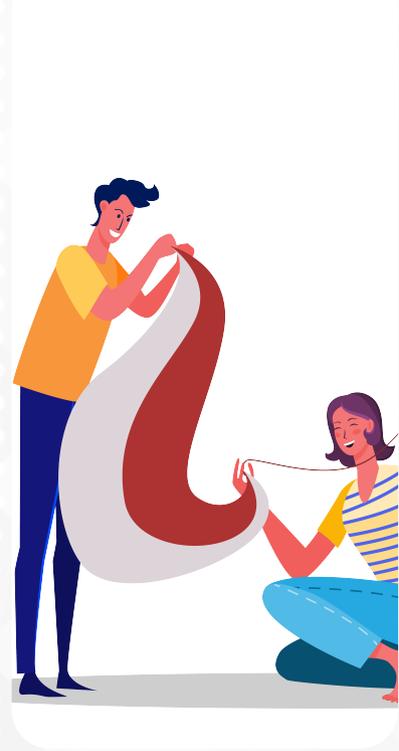


12
BAKTI UNTUK NEGERI

14
TOKOH KOMINFO

22
LIPUTAN UTAMA

22
DIREKTORAT
JENDERAL
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK



24
NARASI TUNGGAL,
UPAYA MERAJUT
KOMUNIKASI
PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT

26
FMB 9, WADAH
KOBALARASI
KEMITRAAN UNTUK
PENINGKATAN
KEPERCAYAAN PUBLIK

25
GPR TV, PORTAL
AGREGATOR AUDIO
VISUAL



32

INDONESIA BAIK,
GAET GENERASI
MILENIAL MELALUI
BANK DATA
PEMERINTAH

35

DISEMINASI PROGRAM
PEMERINTAH ALA
BURUNG KOLIBRI

40

PRANATA HUMAS
INDONESIA: PASUKAN
'BHAYANGKARA'
CITRA DAN REPUTASI
BANGSA

42

SOROTAN MEDIA



50

PORTAL KOMINFO

56

MISS LAMBE HOAKS

61

TOK-TOK KOMINFO

76

SISTERNET

79

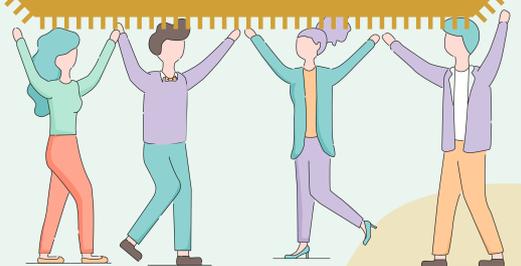
LINTAS KOMINFO



Redaksi KominfoNEXT menerima artikel dalam bentuk **opini, liputan, atau tulisan ringan** lainnya sesuai dengan rubrikasi dalam KominfoNEXT. Naskah maksimal 2 halaman A4 spasi 1,5 dikirimkan melalui

majalahkominfoNEXT@kominfo.go.id

dengan subject: **Naskah Kominfo Next**. Bagi Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapatkan honorarium sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku di tahun berjalan.



GERAK CEPAT MENTERI JOHNNY

Setelah dilantik oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019, Menteri Komunikasi dan Informatika RI langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dan konsolidasi. Serangkaian pertemuan dengan para eselon 1 Kemkominfo digelar untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai pekerjaan rumah bangsa Indonesia di sektor Komunikasi dan Informatika yang harus diselesaikan Kemkominfo RI. Pada minggu pertama, Menteri Johnny menggelar pertemuan empat mata dengan para pimpinan eselon 1. Mulai dari Sekjen Rosarita Niken Widiastuti, Dirjen SDPPI Ismail, Dirjen PPI Ahmad M Ramli, Dirjen Aptika Samuel Pangerapan, Dirjen IKP Widodo Muktiyo, Kepala Badan Litbang Basuki Yusuf Iskandar, Irjen Doddy Setiadji dan Dirut BAKTI Anang Latief.

Langkah berikutnya adalah mendengarkan ke-8 Eselon 1 memaparkan seluruh rencana program di rapat Pleno. Menteri Johnny pun mendapatkan gambaran bahwa hal-hal yang perlu dirampungkan segera oleh Kemkominfo RI antara lain RUU Perlindungan Data Pribadi. Isu penting yang digariskan oleh Menteri Johnny melalui RUU ini adalah kedaulatan data yang menjadi titik tekan Presiden Jokowi. Menteri Johnny memimpin rapat koordinasi antar Kementerian Lembaga untuk memastikan bahwa Pemerintah sudah satu suara dalam mengelola dan menata data pribadi di tanah air. Selanjutnya Revisi

UU Penyiaran yang menjadi legislasi primer untuk menjadi dasar hukum bagi digitalisasi penyiaran dan juga penataan RRI dan TVRI.

Dari aspek pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Menteri Johnny menyetujui rencana BAKTI untuk membangun Satelit Multifungsi Satria, tidak hanya 1 satelit tapi jika memungkinkan secara finansial akan dibangun 3 satelit hingga tahun 2035.

Juga akan melanjutkan pembangunan BTS yang telah dibangun sekitar 1.500 selama 2 (dua) tahun terakhir ini, tahun 2020 akan dibangun sekitar 3.500 BTS di daerah 3T. Tidak berhenti di situ saja, juga akan melanjutkan Palapa Ring tahap kedua yakni menggelar sekitar 8.000 kilo meter fiber optic dari kota/kabupaten ke kecamatan dan desa.

Penataan ulang frekuensi juga akan menjadi perhatian Menteri Johnny. Menteri Johnny menyadari penuh bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasi oleh negara. Karenanya pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.

Menteri Johnny juga akan melanjutkan penguatan startup digital di tanah air. Saat ini Indonesia memiliki 4 unicorn dan 1 decacorn. Menteri Johnny akan mendorong perusahaan-perusahaan rintisan di bidang digital untuk terus berinovasi melalui deregulasi dan sejumlah program penguatan lainnya di Ditjen Aplikasi Informatika.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi visi besar Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya ini juga menjadi perhatian Menteri Johnny. Program *Digital talent* Scholarship yang sudah sukses memberikan pelatihan dan edukasi kepada 25 ribu anak millennial di tahun 2019, akan ditingkatkan jumlahnya menjadi 50.000 peserta di tahun depan.

Menteri Johnny juga menekankan bahwa Kementerian Kominfo terdiri atas dua hal penting yakni urusan komunikasi dan informasi serta urusan informatika. Karenanya, Menteri Johnny akan meningkatkan peran Kemkominfo sebagai Humas Pemerintah atau GPR. Cara-cara baru komunikasi kepada publik akan dilakukan agar publik benar-benar menjadi bagian dari proses pembangunan menuju Indonesia Maju.

Nah Pembaca yang Budiman, edisi ke-11 Majalah Kominfo Next kali ini secara khusus mengangkat topik mengenai informasi dan komunikasi publik. Kami ketengahkan dialog khusus dengan Dirjen IKP Prof Widodo Muktiyo dan sejumlah laporan utama mengenai upaya Ditjen IKP menyampaikan informasi kepada publik melalui bergai saluran dan kanal media.

Selamat Membaca

IN

KOMINFO

we trust

KUNJUNGI KAMI DI:

 @KEMKOMINFO

 KEMKOMINFO

 @KEMENKOMINFO

 KEMKOMINFO TV

ATAU LANGSUNG
SCAN QR-NYA



ON GOING:


Lambe Hoaks

2X DALAM
SEMINGGU
SENIN & KAMIS

SETIAP AKHIR
BULAN




TOK TOK
KOMINFO

1X DALAM
SEMINGGU

#KOMINFOPEDIA

2X DALAM SEBULAN


TikTok
ID : Kemkominfo

SETIAP HARI

COMING SOON:

- KOMINFOHITS!
- VIRAL POSITIF
- KAMERA KOMINFO
- TAMU KOMINFO



Smartwatch Inovasi Baru Penggunaan Teknologi

Jam tangan saat ini telah menjadi perhiasan yang paling populer dan digunakan baik pria dan wanita. Fungsi jam tangan tidak lagi hanya sebatas sebagai penunjuk waktu maupun hiasan, perkembangan teknologi membuat jam tangan saat ini juga berfungsi sebagai gawai atau populer disebut sebagai *smartwatch*. Para pengembang jam tangan baik yang memang *core business* nya di bidang jam tangan sampai pengembang perangkat gawai berlomba-lomba mengembangkan jam tangan canggih yang memenuhi kebutuhan masyarakat jaman now.

1 Apple Watch Series 5

Apple sebagai salah satu *brand* pembuat komputer pribadi dan *handphone* tidak ketinggalan untuk meluncurkan *smartwatch*. Perusahaan dengan logo buah apel ini sudah meluncurkan *smartwatch* yang dinamakan Apple Watch bahkan sudah sampai seri ke-5. Apple watch hadir dengan desain simple dan elegan, khas seperti *line up* produk Apple lainnya.

Pembaruan yang dilakukan Apple dari seri sebelumnya yaitu *processor* dan *wireless performance* yang lebih bagus dibandingkan seri sebelumnya. Hal yang berbeda dengan seri-seri sebelumnya yaitu fitur Always on Display (AoD) yang membuat layar Apple Watch akan terus menyala. Selain itu juga, ada juga fitur yang sudah ditanamkan di seri-seri sebelumnya seperti pemantau denyut jantung Electrocardiogram (ECG), sensor pendeteksi jika pengguna jatuh dan fitur panggilan darurat. Saat ini, para Apple Fanboy maupun Sobatkom yang ingin memiliki jam ini harus merogoh kocek sebesar Rp. 5.600.000,-



2 Samsung Galaxy Watch Active 2

Persaingan antara perusahaan 2(dua) raksasa *smartphone* Apple dan Samsung berlanjut di pasar *smartwatch*. Berbeda dengan saingannya, Watch Active 2 memiliki bentuk bulat minimalis dengan dibekali Exynos 9110 dual core 1,15 GHz.

Smartwatch ini cocok buat Sobatkom yang memang hobi berolahraga dengan total hampir 39 jenis olahraga yang bisa dilacak seperti misalnya berenang, berlari, bersepeda, treadmill, bulu tangkis dan olahraga lainnya. Tidak kalah dengan jajaran *sportwatch* di pasaran ya Sob. Menariknya *smartwatch* ini bisa mengukur tingkat stress kita. Dan buat para penggemar music, kalian bisa juga mengontrol Spotify dari jam tangan ini.

Saat ini, Galaxy Watch Active 2 dibanderol Rp. 4.199.000 untuk ukuran 40 mm dan Rp. 5.499.000 untuk ukuran 44 mm.



3 Polar M430

Jam ini menjadi *best selling running watch* di Eropa di tahun 2019. Dengan mengusung konsep durabilitas dan mudah digunakan. Jam ini hadir dengan built in *heart rate monitor* dan *continuous heart rate tracking off* yang memungkinkan Sobatkom untuk memonitor denyut jantung baik selama *workout* maupun pada jeda istirahat.

Dengan terhubung ke aplikasi Polar Flow App, jam ini bisa digunakan untuk mengatur jadwal *workout* sampai dengan menjadi asisten yang akan memonitor aktifitas keseharianmu. Dengan ukuran jam yang ekstra *compact* jika dibandingkan dengan kemampuan jam ini untuk memonitor *workout* selama 30 jam non-stop. Harga pasaran untuk jam ini yaitu Rp. 4.040.000,-





4 G-Shock G-Squad GBA 800

Casio G-Shock sudah menjadi fenomena budaya sejak tahun 90an. Buat para Gen-X ga gaul kalo ga pakai G-Shock, baik buat ke sekolah ataupun nongkrong. Jajaran *line up* casio G-Shock tetap istiqomah sampai sekarang dengan mengusung konsep *durability*. Jam ini diklaim tahan terhadap "triple 10" test, yaitu tahan jatuh dari 10 meter, tahan terhadap tekanan sampai 10 bar dan baterai tahan selama 10 tahun. Huruf 'G' di G-Shock sendiri merujuk pada ketahanan jam ini dalam bernegosiasi dengan kekuatan Gravitasi.

G-Shock G-Squad GBA 800 menghadirkan segala kelebihan jajaran seri G-Shock dengan penambahan fitur untuk Step Tracker dengan sensor ayun atau *accelerometer*. Sayangnya, untuk bisa mendapatkan data akurat, jam ini masih membutuhkan koneksi ke *smartphone* kita melalui aplikasi G-Shock Connected. Jam ini tahan untuk menyelam sampai kedalaman 200 meter, bahan resin yang kuat, zona waktu di 300 negara serta fitur sinkronisasi ketika dihubungkan dengan *smartphone*. Fitur lain

yang cukup menarik yaitu adanya lampu LED jam akan otomatis menyala ketika kita mengayunkan tangan ke depan, walaupun sebenarnya fitur ini sudah jamak ada bahkan di *sportwatch* dengan harga ratusan ribu saja.

Jam ini bisa Sobatkom dapatkan dengan harga Rp. 2.379.000, cocok buat yang ingin menambah koleksi G-Shock ataupun bernostalgia dengan era 90an tanpa tertinggal fitur era digital.

DUNIA POLITIK

Kehadiran Dunia Digital
dan Pengaruhnya Terhadap Politik



POLITIK ERA DIGITAL, EDISI 2

Penulis : Agus Hiplunudin

Penerbit : Suluh Media/Graha Ilmu

Tebal : 116 Halaman

Cover : Soft Cover

Tidak bisa dipungkiri, hadirnya era digital memberikan dampak terhadap peredaran informasi di masyarakat. Masyarakat disuguhi dengan banyak sekali sumber-sumber informasi yang membahas dari hal paling tidak penting sampai dengan hal yang sangat penting dan mendasar. Masyarakat era digital yang juga populer disebut netizen, dalam memperoleh informasi tersebut sudah tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Hal yang membatasi mereka saat ini hanya kuota internet, sinyal WiFi dan tentunya sisa baterai di gawai mereka. Salah satu kanal informasi yang menjadi primadona di era digital yaitu media sosial.

Buku ini membahas era digital dari sudut pandang yang sedikit berbeda dibandingkan buku-buku lain dengan tema era digital yang sering ditemui. Ketika berbicara era digital, orang akan terbersit tentang teknologi, komunikasi, marketing, dan hal-hal lain yang melibatkan huruf "e" (e kecil) di depan satu kata (eGovernment, eCommerce dll). Tapi ternyata dampak digitalisasi tidak berhenti sampai disitu saja, bidang yang sebenarnya terhitung jauh dari hiruk pikuk digital pun terkena imbasnya yaitu politik. Dilihat dari judul buku ini, orang akan langsung terbayang apa yang akan dibahas didalamnya, Politik Era Digital karya Agus Hiplunudin akan kita bahas di resensi buku Majalah KominfoNext edisi kali ini.



Hal yang dibahas dalam buku ini tidak jauh-jauh dari riuh rendah dunia perpolitikan di Indonesia. Selama kurun waktu 10 tahun kebelakang, media sosial begitu kuat mempengaruhi politik yang berimbas pada dunia politik secara keseluruhan, mulai dari partai politik, pemilihan umum, bagaimana positioning partai politik dan para politisi, marketing politik, kampanye, komunikasi politik sampai dengan pencitraan. Semua hal tersebut saat ini jamak dilakukan melalui media sosial. Dari sisi realitas ruang dan waktu, media sosial berada di dunia maya, suatu dunia disisi seberang dunia nyata. Era digital menggeser konsep dunia maya dan dunia nyata menjadi satu, karena apa yang kita lakukan di dunia maya akan berimbas ke dunia nyata, begitupula sebaliknya. Buku ini membahas secara seksama bagaimana aktifitas di dunia maya mempengaruhi pola dan konsep politik saat ini.

Dengan semakin luasnya penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia (berdasarkan data Hootsuite di Januari 2019 mencapai 56% dari total penduduk Indonesia) menjadikan media sosial sebagai pasar potensial untuk bisa meraup keuntungan politik. Partai dan politikus bisa melakukan kampanye secara cuma-cuma. Walaupun terlihat mudah, kampanye media sosial juga harus didukung manajemen komunikasi yang baik dan pengetahuan tentang media sosial itu sendiri, seperti misalnya psikologi pengguna, jenis konten dan waktu penyampaian yang efektif dan seluk beluk lainnya. Jika tidak dengan pengetahuan dan manajemen yang tepat, kampanye melalui media sosial bisa mubazir bahkan bisa menjadi bumerang bagi partai dan politikus. Netizen menjadi suatu struktur sosial masyarakat pada awal abad 21 yang terbentuk melalui komunikasi berbagai jaringan digital. Jaringan ini terbentuk dari simpul-simpul yang umumnya individu atau

Bab 1

Pendahuluan

Bab 2

Politik Masyarakat Era Digital dalam Tinjauan Eletronik

Bab 3

Partai Politik di Era Digital

Bab 4

Pemilihan Umum di Era Digital

Bab 5

Marketing Politik di Era Digital

Bab 6

Persepsi dan Positioning Politik di Era Digital

organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, buku ini menyampaikan dampak hadirnya struktur baru (masyarakat digital) yang dibentuk dari jaringan digital ini. Masyarakat digital, dalam praktik sosial, melahirkan budaya dan trend yang seragam sebagai manifestasi dari pilihan bebasan (praktik sosial) namun pilihan bebas itu, sejatinya bukan pilihan dirinya sendiri, melainkan pilihan atas kehendak para penguasa digital. Jaringan digital dijadikan instrumen atau alat untuk mempengaruhi, atau bahkan mengontrol praktik sosial.

Masyarakat digital tidak boleh menutup mata; sebab di era digital habitus, modal, dan ranah telah dikuasai oleh para penguasa digital. Begitu juga dalam bidang politik; dimana politik secara strukturalisme Bourdieu telah dikuasai, dikontrol, dan diarahkan oleh digital.

Buku Politik Era Digital bisa menjadi sumber rujukan bagi para politisi ataupun yang berminat didunia perpolitikan untuk bisa memanfaatkan dunia maya sebagai sarana merketing dan positioning dalam politik. Namun, secara tersirat buku ini pun memberi wanti-wanti pada negara agar mampu merespons perkembangan dunia digital ini, sebab jika Negara tidak mampu mengelola dunia digital maka yang terjadi—Negara akan dikendalikan oleh dunia digital itu sendiri.

Perpustakaan Kominfo



LANTAI 1 GEDUNG B

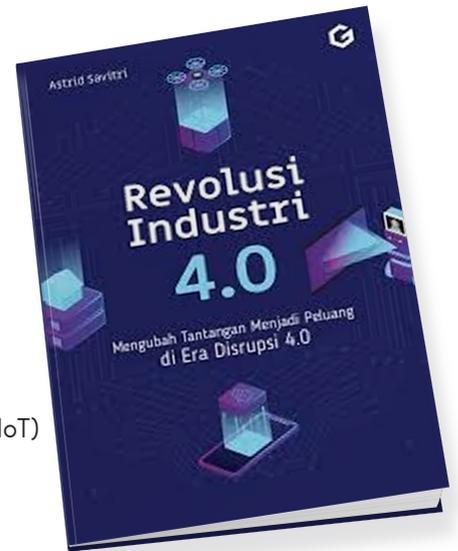
SENIN S.D JUMAT

08.00 S.D 16.00

Revolusi Industri 4.0 : Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0

Pengarang : Astrid Savitri

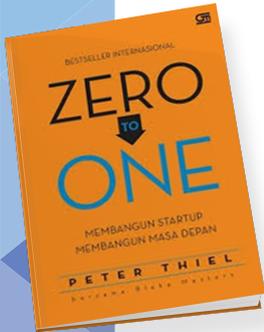
Buku ini mengulas internet yang telah merevolusi cara kerja dunia begitu cepat. Lebih dari 20 miliar perangkat pintar akan terkoneksi pada tahun 2020. Dengan terhubungnya perangkat pintar dari *smartphone*, *smarthome*, asisten virtual, hingga mesin produksi yang ada di pabrik-pabrik menandakan era baru sudah diambang pintu, *internet of things* (IoT) telah berkembang secara masif



Zero To One : Membangun Startup Membangun Masa Depan

Pengarang : Peter Thiel

Buku ini berbicara tentang bagaimana membangun perusahaan-perusahaan yang menciptakan hal-hal baru. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai salah seorang pendiri PayPal dan Palantir dan selanjutnya jadi investor di ratusan usaha startup, termasuk Facebook dan SpaceX.



SIRKUS POHON

Pengarang : Andrea Hirata

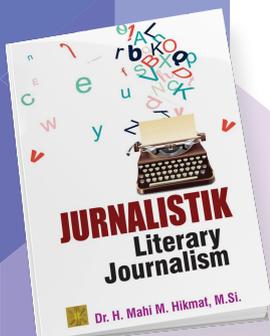
Dalam novel ini Andrea akan membuat kita terbahak-bahak mengikuti kisah orang-orang Melayu di pedalaman Belitong yang lugu, tersedu-sedu oleh kisah cinta yang masygul, atau geleng-geleng kepala oleh intrik-intrik mereka yang luar biasa. Kita akan menemukan manusia-manusia yang tak sempurna, tapi sekaligus menemukan kebijaksanaan dalam diri mereka.



JURNALISTIK : LITERARY JOURNALISM

Pengarang : Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si

Buku ini disusun untuk melayani mahasiswa Ilmu Komunikasi. Selain itu diperuntukkan juga bagi mahasiswa lainnya dalam matakuliah yang hampir sama. Buku ini juga dapat melayani masyarakat peminat jurnalistik yang memerlukan up date sekitar perkembangan dunia jurnalistik kekinian sejalan dengan perkembangan zaman. Sasaran yang ingin dicapai dengan buku ini, secara umum menginginkan mahasiswa memiliki pemahaman yang holistik tentang jurnalistik, baik secara teoritis maupun praktis. Secara khusus mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan praktis dalam menyusun karya jurnalistik, khususnya teknis menulis *literary journalism* yang merupakan hasil perpaduan keterampilan antara jurnalistik terapan dan sastra terapan.



BERSAMA RUANG GURU, BAKTI Berikan Pelatihan Online bagi 206 Guru di Sorong dan Sangihe

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Ruang Guru memberikan pelatihan bagi 206 guru di daerah 3T terutama di Sangihe, Sulawesi Utara, dan Sorong, Papua Barat dengan menggunakan aplikasi pembelajaran online.

Pelatihan bagi para guru ini menurut Direktur Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Danny Januar Ismawan bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan dalam mengelola pembelajaran di kelas dan di luar ruang kelas untuk menghasilkan siswa yang siap bersaing di era industri 4.0 melalui *workshop*, bimbingan, pelatihan, dan pendampingan berstruktur,

“Kita berharap melalui pelatihan ini para guru dapat menguasai strategi, metode dan teknik pembelajaran abad 21 dan era industri 4.0 (*fiip classroom, blended learning, dan project-based learning* serta metode pembelajaran lainnya yang telah teruji) sesuai jenjang dan mata pelajaran yang diampu. Juga diharapkan mampu menerapkan pembelajaran berbasis Higher Order Thinking Skill (HOTS) dan menguasai teknologi informasi sebagai sarana dan media pembelajaran,” harap Danny.

Program Indonesia Teaching Fellowship (ITF) ini diharapkan mampu memajukan pendidikan nasional dengan membekali para guru dengan sejumlah kompetensi diantaranya strategi pembelajaran, perencanaan kurikulum, manajemen pendidikan berbasis sekolah, pembelajaran digital, wawasan pendidikan, keberagaman dalam pendidikan, kompetensi sosial guru, dan lingkungan belajar inklusif. Seluruh kompetensi tersebut disampaikan melalui video yang diakses pada aplikasi belajar Ruang Guru.

“Selain itu dalam kerja sama ini, para guru juga diberikan fasilitas berupa grup chat diskusi dengan fasilitator, akses konsultasi dengan konselor lewat fitur ruang konseling, serta tryout Uji Kompetensi Guru (UKG),” jelas Danny.

Dengan pembangunan infrastruktur akses telekomunikasi oleh BAKTI berupa Proyek Palapa Ring, BTS (Base Transceiver Station) dan akses internet di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah 3T diharapkan dapat mendukung dunia pendidikan di daerah sehingga nantinya bisa ikut memajukan pendidikan nasional.

"Infrastruktur yang telah dibangun BAKTI ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran terutama akses internet. Saat ini BAKTI telah membangun kurang lebih 6.000 site, dan 50% dari total jumlah akses internet tersebut diimplementasikan di sekolah. Sehingga untuk optimalisasi pemanfaatannya, para guru di Sangihe dan Sorong dapat memanfaatkan secara maksimal pembelajaran online yang difasilitasi oleh Ruang Guru," ungkap Danny.

Berbagai tantangan dan hambatan dijelaskan Danny banyak ditemui dalam pelaksanaan program pelatihan ini, mengingat target lokasi adalah daerah 3T. Mulai dari kondisi geografis, lokasi yang remote, lajur transportasi dan juga persoalan logistik. Selain itu tantangan yang tidak kalah beratnya adalah tingkat adopsi peserta pelatihan yang belum merata dan masalah

koordinas dengan dinas pendidikan setempat. Namun tantangan ini tidak mematahkan semangat, namun menjadi pembakar semangat bagi BAKTI dan Ruang Guru.

Ke depan, BAKTI akan menggandeng lebih banyak startup di sektor pendidikan, dan *stakeholder* terkait untuk memberikan pengalaman pembelajaran baru kepada siswa di daerah. Sehingga mampu memajukan pendidikan Indonesia serta membantu mendukung fokus Kabinet Indonesia Maju yaitu untuk pengembangan Sumber Daya Manusia.





PROF WIDODO MUKTIYO SOSOK SEDERHANA YANG GILA KERJA

Karakter, prestasi dan kesuksesan seorang Prof. Dr. Widodo Muktiyo tak lepas dari seorang ibu yang memiliki pengaruh besar terhadap hidupnya. Ucapan seorang ibu merupakan doa bagi Prof. Widodo yang mampu meraih prestasi gemilang di bidang akademik. Hal ini ditandai dengan dikukuhkannya beliau sebagai Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ke-179 dan Guru Besar ke-5 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS dalam Sidang Senat Terbuka, pada 6 Oktober 2016 di Auditorium UNS. Prof. Widodo yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor di Universitas Sebelas Maret UNS Solo ini mengakui, karier dan sederet jabatan yang berhasil diraihinya sebagai hasil pendidikan seorang ibu, meski sang ibunda bukanlah seorang yang berpendidikan tinggi. Dari seorang ibulah Prof. Widodo berhasil ditempa, meski telah menjadi orangtua tunggal sejak sang anak masih belia karena ayahanda telah dipanggil sang Khalik pada saat Prof. Widodo masih berusia 8 tahun.

Prof. Widodo selain berhasil dalam bidang akademik juga memiliki jiwa enterpreneur, memiliki pengalaman yang begitu melekat pada jalan hidupnya dengan menjajakan kembang api saat masih mengenyam pendidikan Sekolah Dasar. Hal inipun menurutnya sebagai didikan seorang Ibu yang selalu mendorongnya untuk melakukan hal-hal positif. Dengan latar belakang itulah, Prof. Widodo hingga saat ini tidak pernah memandang lemah sosok perempuan. Baginya perempuan memiliki kekuatan yang sangat besar, dan pandangan inipun masih melekat kepada istri tercinta yang telah menemani hidupnya selain dua putra-putrinya.

Prof. Widodo yang memiliki aktivitas tinggi kini mempercayakan usaha yang dirintisnya di bidang Garmen kepada istrinya, usaha yang saat ini telah berkembang hingga mampu membuka lapangan

kerja yang tidak sedikit dan menambah sejumlah outlet yang cukup dikenal masyarakat Surakarta dan sekitarnya.

Prof. Widodo mengatakan, usaha Garmen yang dilakoninya selama ini mampu memperkuat ekonomi rumah tangganya, sehingga membuat ia nyaman bekerja sebagai PNS, terlebih ketika nanti tiba waktunya masa bakti sebagai Abdi Negara berakhir, yang dijalani dengan prinsip kerja mengalir di setiap lini. “Double garda menjadikan kita nyaman bekerja Insya Allah, istilahnya *jinjit-jinjit ngati-ngati* supaya akhir jabatan kami, bisa husnul khotimah. Nanti bisa berkarya di bidang lainnya, nggak tahu di mana, Allah yang menggariskan. Poinnya semangat, kalau kita berprestasi, bisa memberikan manfaat, di manapun akan menjadi bermanfaat bagi institusinya, saya itu mengalir di setiap lini dan membawa makna pada setiap alirannya,” ungkapnya.

Selalu membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar, karyawan, maupun staf dan keluarga besarnya, adalah kunci karier pria yang memiliki hobi berkebun ini, meski istrinya juga memiliki kesibukan yang luar biasa sebagai pengusaha dan motivator.



Hal ini juga diakui istri tercinta, Ir. Herawati. Di kediaman mereka, Prof. Widodo tetaplah seorang suami dan bapak yang selalu mengajak berdiskusi di setiap kesempatan, seperti saat bersenda gurau di meja makan atau setelah melaksanakan ibadah sholat. Menurut Herawati, sebagai seorang bapak, suaminya adalah seorang yang tegas, jelas dalam berkomunikasi, juga seorang yang teliti dan selalu memberikan pembelajaran bagi keluarganya, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan sangat berkomitmen, mampu membedakan kapan komunikasi yang santai dan kapan harus diskusi yang serius.

Pemilik gelar Sarjana Pertanian yang telah memberikan 2 anak kepada Prof. Widodo ini, mengatakan dalam keluarganya ada komitmen untuk selalu saling memberi manfaat. “Biasa berdialog secara terbuka bagi istri lebih enak, karena beliau selalu mengamati hal kecil-kecil dan teliti, penataan yang seperti apa, kadang-kadang berbeda, didiskusikan, ciptakan suasana kalo pas santai, saling mengingatkan, kuncinya semua sehat, berusaha berbuat baik, di manapun, kapanpun apa yang bisa dilakukan,” tuturnya.

Dr. Andre Rahmanto, sahabat sekaligus rekan kerja Prof. Widodo Muktiyo di UNS, juga menyatakan kekagumannya. Dr. Andre bercerita, pakar komunikasi yang pernah

menjabat sebagai Wakil Rektor IV ini adalah sosok yang ramah, rendah hati, pekerja keras, dan selalu memberikan motivasi serta semangat kepada semua orang di sekitarnya.

Guru Besar yang telah memberikan prestasi gemilang bagi kemajuan UNS ini, menurutnya sangat aktif di berbagai organisasi, sehingga menambah kredibilitasnya. “Beliau aktif di berbagai organisasi, organisasi sosial juga. Itu akan menambah kredibilitas dan pengakuan, serta reputasi sebagai akademisi sekaligus sebagai tokoh yang bermanfaat dan selalu menginspirasi bagi publik,” katanya.

Dr. Andre yang juga Kepala Humas UNS mengungkapkan, Prof. Widodo Muktiyo sebagai Pakar bidang kehumasan yang aktif menjadi pengurus Perhumas Pusat, juga berhasil membuktikan kepakarannya setelah mendapat penghargaan sebagai akademisi bidang *Public Relations* dari Perhumas. Ini menurutnya merupakan capaian yang luar biasa dan pantas menjadi teladan bagi generasi muda.

Tak berhenti sampai di situ, ternyata takdir membawa karir Prof. Widodo melesat lebih tinggi. Bertepatan pada hari Jumat, 6 September 2019, Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014 – 2019, Rudiantara, melantik Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada kesempatan tersebut Menteri Kominfo mengatakan tantangan Kemkominfo ke depan semakin berat khususnya masalah kecepatan. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) harus mengikuti kecepatan berkomunikasi dengan jenjang komunikasi antara mengambil keputusan strategis dengan mengkomunikasikan kepada publik tidak bisa secara langsung.

“Prof. Widodo datang ke Kominfo dengan harapan baru, dan jangan sungkan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik terutama lebih cepat. Aturan yang membuat kita-kita juga, jadi kalau ada yang lebih baik lagi, lebih cepat lagi, lebih efektif lagi dan efisien. Kita akan ubah aturan yang ada,” tukas Menteri Kominfo saat itu, Rudiantara.

Pemunjukan dirinya sebagai Dirjen IKP



membuktikan ikhtiar Prof. Widodo untuk terus bersemangat dan memberikan manfaat di manapun ia ditempatkan. “Saya melamar sebagai Dirjen IKP karena posisi itu relevan dengan kompetensi yang saya miliki. Disiplin ilmu saya mulai strata 1 sampai S3 di bidang Ilmu Komunikasi. Kemudian saya dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP UNS. Saya juga sudah lama menjadi praktisi bidang kehumasan. Sehingga saya siap mengemban tugas baru sebagai Dirjen IKP Kemenkominfo,” jelasnya.

Prof. Widodo aktif dan cekatan dalam mengemban peran barunya sebagai *Government Public Relations*. Tak butuh waktu lama karena ia menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya sebagai pakar komunikasi dan kehumasan, maka tak heran Prof. Widodo sangat fasih menajalankan pekerjaannya saat ini. “Tugas kita ini bagaimana mengedukasi, membangun literasi media kepada masyarakat yang sudah tercampur oleh teknologi internet,” ungkapnya.

Dengan kemahirannya dalam bidang komunikasi dan segudang pengalaman yang telah beliau jalani, maka pantaslah kita menaruh kepercayaan dan dukungan luar biasa kepada Prof. Widodo untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

[bit.ly/ 36kXMLu](https://bit.ly/36kXMLu)

PROF. DR. WIDODO MUKTIYO



Tempat / Tanggal Lahir:

Klaten, 27 Februari 1964

Pangkat / Golongan:

Pembina Utama Muda / IV C

Pekerjaan:

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika

RIWAYAT PENDIDIKAN

SARJANA / S1

Ilmu Komunikasi (FISIP)
UGM - Yogyakarta
1987

Ekonomi Manajemen (FE)

UII - Yogyakarta
1988

PASCASARJANA / S2

Ilmu Komunikasi
Pascasarjana
UI - Jakarta
1995

DOKTOR / S3

Ilmu Komunikasi
Pascasarjana
UI - Jakarta
2007

RIWAYAT PEKERJAAN

**Dosen Jurusan Ilmu
Komunikasi FISIP UNS**
1988 - sekarang

Asesor BAN PT
2010 - sekarang

**Ketua Ikatan Sarjana
Komunikasi ISKI Jateng**
2015 - sekarang

**Dewan Kehormatan
BPP Perhumas
Indonesia**
2017 - 2020

**Asesor SKKNI
Kompetensi Kehumasan
dari LPS PRI**
2015 - sekarang

**Wakil Rektor Bidang
Perencanaan dan
Kerjasama UNS**
2015 - 2019

**Anggota Majelis Dikti
Litbang PP
Muhammadiyah**
2016 - 2020

PENGHARGAAN

**Dosen Berprestasi
FISIP UNS**
2008

**Penghargaan MIPR (Member of
International Public Relations)
BPP PERHUMAS Indonesia**
2013

**Penghargaan PR Award For
Educators dari London School
of Public Relations Jakarta**
2014

**Penghargaan Perhumas Award
sebagai pelopor Pendidikan
Kehumasan Indonesia, di Bandung**
2016

**Penganugerahan Tanda
Kehormatan Satya Lencana
Karya Satya XXX**
2018

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Juni 2015, Presiden Joko Widodo menetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang menginstruksikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk mengkoordinasikan komunikasi publik Pemerintah kepada masyarakat.

Inpres Pengelolaan Komunikasi Publik ini diterbitkan guna menunjang keberhasilan pemerintah, menyerap aspirasi, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, dengan tujuan agar pemerintahan melaksanakan komunikasi publik yang efektif, tepat sasaran, dan berkualitas.

Oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), Inpres diimplementasikan melalui *Government Public Relations* (GPR), program prioritas pengelolaan informasi dan komunikasi berkelanjutan untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan tugas Ditjen IKP untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Saat memberi arahan pertamanya usai pelantikan, Menteri Kominfo Johnny G. Plate pun telah menegaskan bahwa komunikasi kebijakan adalah salah satu fungsi utama Kementerian Kominfo yang harus berjalan seimbang. “Sangat dibutuhkan agar rakyat tahu arah kebijakan pemerintah, jadi bisa ambil bagian langsung, bukan sebagai penonton. Jangan sampai rakyat jalan sendiri ke kiri, pemerintah ke kanan. Kita ingin pemerintah dan rakyat ketemu di satu simpul,” jelas Menteri Johnny pada Rabu (23/10/2019).

Dalam hal komunikasi tersebut, Menteri Johnny menekankan pentingnya kerja sama pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan negara. “Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan itu memberi efek berkelanjutan, rakyat tindak lanjuti dan ambil bagian di dalamnya. Saya akan minta kita bekerja sama dengan Setneg (Kementerian Sekretariat Negara), KSP (Kantor Staf Presiden), Jubir Presiden, untuk peran-peran aktif dalam komunikasi kebijakan negara,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Jenderal IKP, Prof. Widodo Muktiyo pernah menyampaikan bahwa GPR akan bekerja dengan konsep. “Kehumasan itu *untouchable but measurable*. Di humas, ilmunya *important news is good news*, bukan *bad news is good news*. Kami tidak ingin bekerja berdasarkan respon, tapi bekerja berdasarkan konsep bagaimana komunikasi menjadi kebutuhan kita. GPR itu bukan pepadam kebakaran,” jelas Dirjen Widodo dalam acara Media Gathering, Senin (25/11/2019).

Menurutnya hal ini penting, mengingat zaman telah memasuki era transformasi yang sangat cepat dalam penyebaran informasi. “Ini penting untuk Kominfo, bagaimana pesan itu sampai ke masyarakat. Apalagi di era 4.0 sekarang, *civil society* saja sudah bisa jadi media, cara lama kalau ngga diubah dengan cara baru pasti ketinggalan. Istilahnya Pak Jokowi, ‘tidak hanya send, tapi deliver.’”

Kini, 4 tahun berjalan sejak Inpres ditandatangani. Ditjen IKP melalui GPR telah melahirkan banyak produk dan membangun berbagai jaringan komunikasi baik antar Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah. Liputan Utama edisi ini akan mengupas tuntas berbagai program utama dari GPR, di antaranya Narasi Tunggal, Forum Merdeka Barat (FMB) 9, GPR TV, Indonesiabaik.id, hingga pengelolaan akun LINE @kemkominfo dengan penjenamaan Kolibri (Kemkominfo Lintas Berita Terkini).

DITJEN IKP dan Produknya



FMB 9



GPR TV



GPR News



Infopublik



Komunika

Komik
KomunikaLINE
Kolibri

Indonesiabaik.id



Genposting



KIDi



Sakuin

Handbook
of IndonesiaFriends
of IndonesiaJurnal Dialog
Kebijakan Publik

DITJEN IKP dan Jejaringnya

34

Kementerian

100

lebih
lembaga

514

Dinas
Kominfo
Daerah

696 K/LD

4475

Kelompok
Informasi
Masyarakat

74

Forum
FKMetra

1578 JFPH

226

Media
Center
(2015)

463

Lembaga
Media di
18 prov

412

Satgas
Medsos di
265 K/L/D

505

Mitra
Blogger

10

ASEAN
blogger

NARASI TUNGGAL, UPAYA MERAJUT KOMUNIKASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Persoalan kecepatan dalam merespon dan memberikan informasi kepada masyarakat hingga saat ini masih menjadi PR pemerintah. Selain itu, pemerintah dinilai masih belum berhasil dalam menyampaikan informasi secara menyeluruh dan mampu menjelaskan suatu permasalahan secara tuntas. Hal ini bisa dilihat saat terjadi kenaikan harga bahan pangan, kenaikan BBM, juga isu lainnya yang seringkali informasi dari Kementerian dan Lembaga berbeda-beda sehingga membuat bingung masyarakat.

Jika dilihat lebih jauh, masih ada beberapa kasus lain terkait simpang siur informasi resmi dari pemerintah seperti persoalan eksodus

tenaga kerja asal Tiongkok, kenaikan pajak kendaraan dan lainnya. Masyarakat terlanjur menerima informasi yang sepotong-sepotong, juga banyak informasi dan kabar hoaks yang ikut memberitakan persoalan-persoalan tersebut. Hal ini memperlihatkan pemerintah masih belum mampu mengelola pesan dan informasi dengan baik dan dirasa masih belum berhasil menyampaikan informasi menyeluruh dan menjelaskan persoalan dengan tuntas.

Hal ini kemudian menuntut pemerintah agar mampu mengatasi berbagai persoalan terkait ini, karena masyarakat membutuhkan informasi yang utuh dan tidak membingungkan. Sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi secara komprehensif dan solid sehingga masyarakat bisa meyakini dan mempercayai semua informasi yang bersumber dari pemerintah.



MERAJUT KOMUNIKASI MELALUI NARASI TUNGGAL

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Dalam Inpres ini ditekankan pentingnya peran *Government Public Relations* (GPR). Di sini Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan tanggung jawab untuk mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) akan lebih efektif jika komunikasinya terintegrasi. Prinsip pengelolaan komunikasi publik ini dilakukan melalui Narasi Tunggal yaitu narasi positif dari K/L/D terkait program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah yang perlu diketahui oleh masyarakat yang diseminasikan melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki oleh K/L/D. Narasi tunggal diharapkan bisa merajut komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

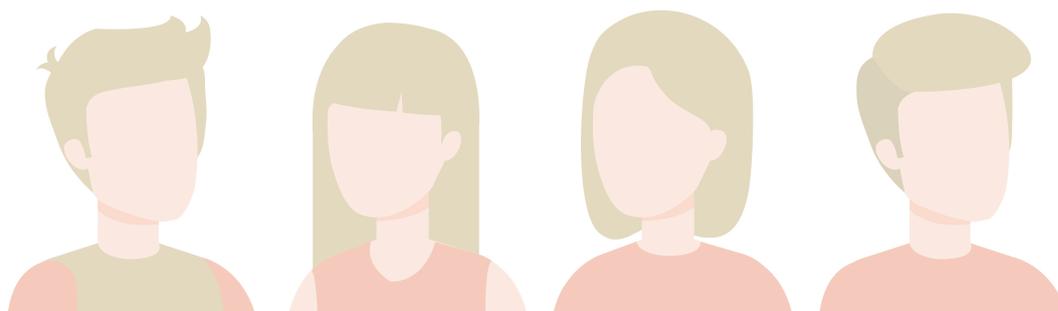
“Kehadiran narasi tunggal yang tertuang dalam Inpres 9/2015 diharapkan akan merajut komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat dalam menjawab kebutuhan informasi terkait dengan isu yang beredar terutama yang lintas sektoral dan melibatkan berbagai Kementerian/ Lembaga, seperti mudik lebaran, bencana alam, kenaikan BBM, Pemilihan Presiden. Karena saat itu masyarakat banyak dibingungkan saat mencari informasi di satu Kementerian tertentu, kemudian mereka membandingkan dengan Kementerian lain,” jelas Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Media Ditjen IKP Andi Muslim.

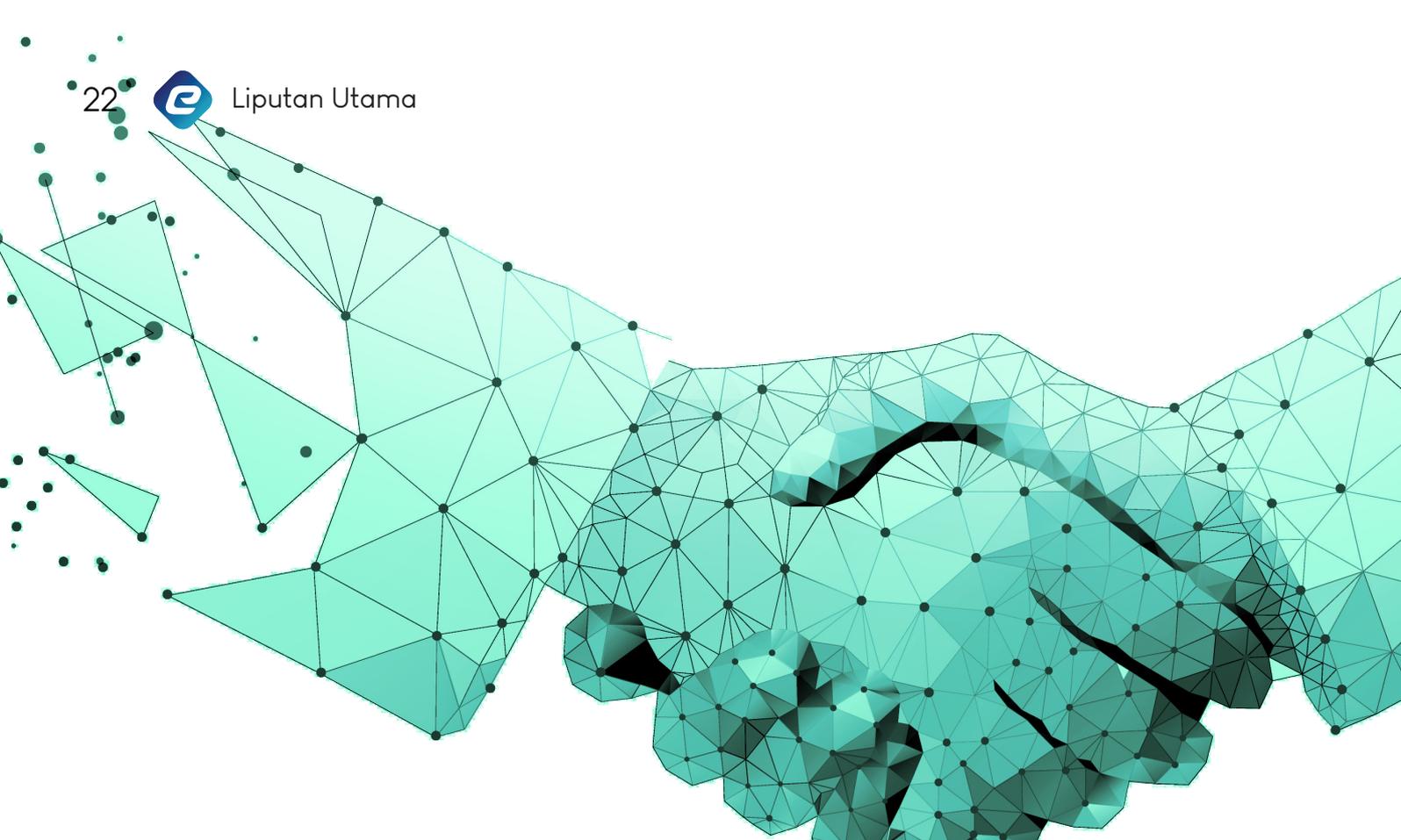
Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa narasi tunggal hadir untuk menjawab perbedaan-perbedaan informasi yang beredar saat suatu isu bergulir. Jadi kemanapun masyarakat mencoba mengakses informasi terkait suatu isu, program atau kebijakan pemerintah baik di media sosial, website resmi dan akun medsos Kementerian dan

Lembaga maka kontennya akan sama.

Dalam pengelolaan narasi tunggal juga dibutuhkan respon yang cepat. Hal ini dikarenakan respon tersebut diperlukan untuk mencegah isu-isu sensitif yang bisa saja disulap menjadi berita hoaks. “Dengan banyaknya Kementerian Lembaga yang berbicara tentang hal yang sama pada waktu yang sama maka akan mengurangi celah bagi berita negatif yang berkembang liar di media,” ungkap Andi.

Ke depan, Andi berharap akan semakin banyak narasi tunggal yang dihasilkan dengan beragam konten. “Untuk perubahan ke depan, kita berharap konten narasi tunggal bisa lebih beragam dan ‘seksi’, juga kemasannya lebih menarik, agar kontennya lebih mudah menjadi viral dan masyarakat lebih mudah mendownload dan meneruskan ke kanal-kanal milik pribadinya sehingga semakin banyak orang bisa mendapatkan konten-konten narasi tunggal tersebut,” harapnya.





FMB9

WADAH KOLABORASI KEMITRAAN UNTUK PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Atas kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah, Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) hadir sebagai wadah “kolaborasi kemitraan” (K/L/D, media, *blogger*, unit internal) dengan menggabungkan beberapa konsep komunikasi menjadi satu kesatuan yaitu komunikasi dalam bentuk konferensi pers, forum diskusi, dan sosial media yang diperkuat dengan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan juga media massa.

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Kominfo dituntut untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, dan sejalan dengan salah satu fungsi Kominfo sebagai pelaksana *Government Public Relations* (GPR).

Kepercayaan publik dapat ditingkatkan dengan syarat publik teredukasi dengan baik dan benar mengenai program dan kebijakan pemerintah. Strategi memenangkan kontes informasi di era keterbukaan ini tidak lagi dapat dilakukan sendiri-sendiri namun harus berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder*, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Perkembangan teknologi nyata telah memberikan dampak pada pola komunikasi masyarakat, apalagi dengan pemanfaatan media online dan media sosial yang sangat gencar saat ini menuntut pemerintah turut wajib mengubah strategi komunikasi.

Dalam kondisi “perang wacana” saat ini, komunikasi pemerintah tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus berprinsip pada pola “Kolaborasi Kemitraan” yang mengumpulkan kekuatan bersama-sama, baik paralel antar kementerian lembaga,

media, komunitas, dan *blogger*, maupun hal terkecil yaitu sinergi antar unit internal di Ditjen IKP.

Nama FMB9 diambil dari alamat Kementerian Kominfo yang berada di Medan Merdeka No 9, Jakarta Pusat. Ada keinginan dan doa untuk menjadikan Kominfo sebagai icon GPR pemerintah namun belakangan diplesetkan menjadi Forum Menteri Bicara oleh mitra kalangan Kantor Staf Presiden (KSP). Atas keberhasilan sinergi dengan KSP dan juga K/L/D membuat FMB9 berhasil menghadirkan cukup banyak menteri-menteri dalam forum diskusi ini. Tanpa kolaborasi dengan instansi-instansi tersebut, sangat sulit untuk menghadirkan narasumber menteri.

Perjalanan program ini sendiri cukup panjang sejak awal tahun 2017, perbaikan kualitas program terus mengalami perbaikan dalam penyajian dan juga kemitraannya. Perjalanan 2,5 tahun ini semakin meyakini bahwa kunci utama keberhasilan dari program ini ada dua, yaitu; (1) bagaimana kejelian tim dalam melakukan riset substansi dan (2) keuletan tim untuk menghadiri narasumber yang kredibel.

Keunikan program ini adalah bagaimana menyajikan *framing* pemerintah ke dalam *framing* yang dibutuhkan media, sering ditemu kenali apa yang menjadi kepentingan pemerintah tidak sesuai dengan *framing* media, atau sebaliknya, disinilah tantangan tim untuk berkreasi dengan data-fakta

sehingga mendapatkan *framing* yang memuaskan pemerintah dan media.

Untuk itu sebagai *target audience* utama FMB9, media perlu dirangkul agar dapat menyampaikan kebijakan publik kepada khalayak. Media dinilai *powerful* untuk dapat dijadikan partner “penyambung lidah” ke publik, selain dinilai lebih netral yang paling utama adalah jangkauannya yang lebih luas sehingga sangat penting menjadikan FMB9 memiliki daya tarik tersendiri di hati jurnalis media.

Hasil survei terbatas yang dilakukan 2018 kepada beberapa jurnalis didapatkan hasil bahwa 100% jurnalis membutuhkan program FMB9 sebagai medium diskusi pemerintah-media meskipun masih banyak tuntutan perbaikan dari jurnalis seperti kualitas keberimbangan yang perlu lebih banyak menghadirkan narasumber non pemerintah yang memiliki persepsi yang sifatnya melengkapi dari sisi pemerintah.

Melihat dua kunci utama keberhasilan FMB9 tersebut, ditahun-tahun mendatang sangat penting FMB9 memperkuat relasi media dan K/L. Strategi kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk merangkul dua *stakeholder* tersebut karena keduanya memiliki tujuan dan kepentingan yang sama yaitu kejelasan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah.

K/L memiliki kepentingan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada khalayak umum dan media selaku *watchdog* memiliki kepentingan untuk mengetahui secara jelas konteks dari kebijakan dan program pemerintah.

Semangat awal pembuatan program FMB9 diawal 2017 di-setting sebagai mercusuar informasi bagi IKP, yaitu program yang dijadikan referensi bagi kanal-kanal media internal IKP. Apa yang disajikan melalui FMB9 akan didistribusikan via kanal-kanal elektronik internal seperti Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP), Infopublik, Indonesiabaik yang bersifat jenis informasi yang singkat namun belum terdokumentasikan dalam bentuk kanal yang lebih komprehensif menyajikan penjelasan program dan kebijakan pemerintah. Di satu sisi data dan informasi yang dikumpulkan melalui FMB9 sangat melimpah, sayang jika tidak dapat digunakan secara maksimal.

Atas inisiatif Rosarita Niken Widyastuti, Ditjen IKP Kementerian Kominfo membuat majalah GPRNews di awal 2018 sebagai kanal media cetak yang dapat digunakan untuk memberikan narasi deskripsi lebih komprehensif. GPRNews diposisikan sebagai majalah investigasi versi pemerintah, menyajikan hasil pemberitaan FMB9 yang dilengkapi dengan hasil investigasi tim ke lapangan untuk memperkuat narasi program dan kebijakan pemerintah.

Kehadiran GPRNews menjawab kebutuhan tersedianya konten investigasi versi pemerintah. Jika dibandingkan konten investigasi versi media sekelas majalah Tempo dan Gatra, pemerintah pun harus memiliki konten investigasi versi mereka sendiri. Masyarakat membutuhkan informasi terkait konteks dari program dan kebijakan pemerintah secara menyeluruh,

berbeda ketika disajikan dalam bentuk *straightnews* ataupun infografis yang hanya menyampaikan secara parsial menyesuaikan dengan standar konten jenis mereka yang cenderung sesingkat-singkatnya.

Kekuatan dari GPRNews adalah kemampuan dalam penyajian data dan informasi yang komprehensif secara menggelitik, tetap berpihak pada kebijakan pemerintah namun disajikan secara berimbang. Strategi keberimbangan ini penting untuk dapat menarik orang untuk membaca. Kemasan GPRNews sendiri dikemas sedemikian rupa agar tampak layaknya majalah komersil, baik dari sisi cover, layout, bahkan substansinya.

Tampilan menarik merupakan strategi untuk menarik mata pembaca, keberimbangan substansi merupakan strategi untuk menjaga kesetiaan pembaca. Keberimbangan substansi ini menjadi hal penting yang harus dijaga, bagaimana menyajikan apa yang menjadi konteks kepentingan kebijakan pemerintah dan apa yang menjadi konteks kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah adalah instansi yang terbuka untuk menerima masukan demi kemajuan NKRI.



GPR TV PORTAL AGREGATOR AUDIO VISUAL



Maraknya penggunaan media sosial saat ini tidak bisa dipungkiri membuat produksi konten audio visual semakin merajai media digital. Apalagi fenomena ini terus ingin diikuti oleh lembaga pemerintahan yang kerap berpacu dengan zaman. Menjamurnya konten kreatif dalam bentuk video membuat institusi pemerintah seperti memiliki kewajiban membuat akun resmi pada *platform* media sosial Youtube.

Berawal dari menerka perkembangan konten audio visual yang semakin masif, tak ayal membuat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) yang berperan sebagai humas pemerintah menginisiasi lahirnya TV yang menjadi agregator konten audio visual pemerintah Kementerian, Lembaga maupun Daerah. 10 Desember 2018 lahirlah *Government Public Relations Television* (GPR TV) sebagai fasilitator konten berbasis format video yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah.

“Visi dari GPR TV sendiri adalah untuk mencerahkan, memberdayakan dan memperkokoh NKRI antara lain lewat pengenalan ragam potensi dan keunggulan Indonesia yang begitu kaya,” kata Sekretaris Jenderal R. Niken Widiastuti saat menjabat sebagai Direktur Jenderal IKP pada peluncuran GPR TV Desember 2018 lalu.

Sebagai inisiator GPR TV, Sekjen Niken berharap GPR TV dapat menjawab distorsi informasi yang beredar luas di media sosial. Dengan mengumpulkan atau agregasi konten-konten dari berbagai akun youtube milik pemerintah, GPR

TV berhasil konsolidasi selama setahun belakang untuk memberikan tayangan selama 24 jam penuh seperti saluran televisi pada umumnya.

Menurut Kepala Sub Direktorat Audio Visual Ditjen IKP Dimas Aditya Nugraha bahwa selain konten, pemerintah memiliki kelemahan dalam mengelola *database*. Ia mengatakan bahwa *database* di pemerintahan masih dianggap bukanlah sesuatu yang penting. Padahal, kalau *database* tersebut dimanfaatkan dengan baik, seperti halnya GPR TV yang pada akhirnya bisa menayangkan konten-konten selama sehari penuh.

“Pemerintah itu banyak produksi konten tapi yang didiseminasikan beberapa saja karena keterbatasan *budget*. Paling banyak munculnya di media sosial dan situs, nah ini yang sayang. Mereka tidak punya kanal,

sangat terbatas, maka dari itu kita sediakan melalui GPR TV ini,” ungkap Dimas.

Saat ini, aset konten audio visual milik Kementerian, Lembaga dan Daerah yang berhasil dikumpulkan oleh tim GPR TV bisa memenuhi ruang siaran 24x7. Dengan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dimana pemerintah harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik tanpa terkecuali, GPR TV lahir awalnya dengan satelit Ninmedia untuk memberikan akses informasi mengenai program-program pemerintah kepada seluruh masyarakat terutama yang berada di daerah pelosok dan perbatasan yang selama ini tidak bisa menjangkau *channel-channel* TV nasional.

Akses **GPRtv** sekarang melalui

TV Parabola

ninmedia Ch. 02

| | |
|---------------|--------------|
| ChinaSat-11 | 98°BT |
| Frequency | 12500 |
| Symbol Rate | 43200 |
| Polarisasi | [V] vertikal |
| LNB Frequency | 9750/10600 |

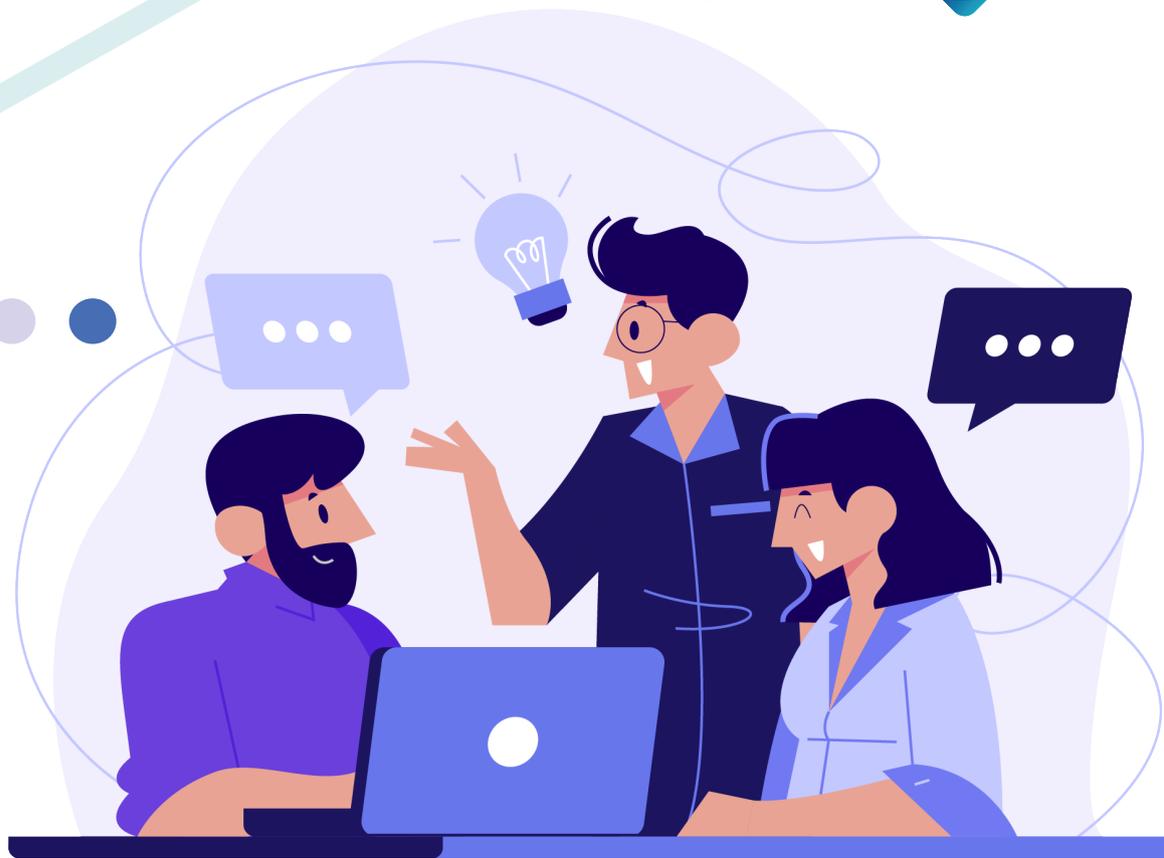
atau

androidtv

Melalui aplikasi **Kugo TV** dan **Oona TV**







Dapat ditonton di *platform* televisi satelit Ninmedia dan aplikasi KUGO, GPR TV menggunakan sistem Opex (Operational expenditure). Sebagai salah satu *database* konten audio visual pemerintah, GPR TV juga terus meningkatkan pelayanannya dalam mengumpulkan potongan-potongan video yang kemudian di edit menjadi sebuah video berdurasi belasan menit. “Targetnya, 25 program video ‘jahitan’ selama seminggu, 1 talkshow, dan 1 liputan luar kota,” ungkap Dimas sebagai *leader production* atau berperan sebagai pemimpin redaksi GPR TV.

Kumpulan potongan video ini diharapkan dapat diambil dari berbagai kontributor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, pada tahun 2019 ini tim GPR TV telah berhasil memberikan pelatihan Mobile Journalism

(Mojo) kepada 328 pegawai pemerintah K/L/D. Mereka dilatih untuk dapat berkontribusi memberikan potongan video selama maksimal 3 menit yang akan diedit menjadi sebuah segmen khusus.

“Gabungan konten-konten video yang ada bisa diklasifikasikan berdasarkan genre. Seperti tayangan anak ditayangkan yang sudah kita setting pada jam tertentu, nah itu waktunya segmen khusus anak,” tambah Dimas saat diwawancarai tim majalah KominfoNext.

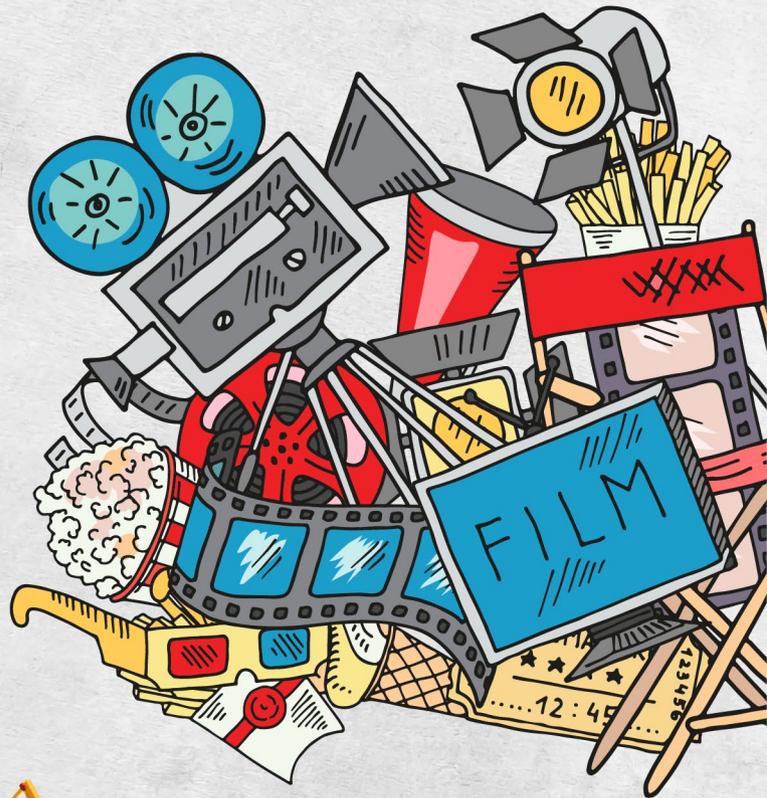
Saat ini, target utama audience GPR TV adalah kawasan perbatasan yang cenderung masih menggunakan antena parabola untuk menonton televisi. Targetnya pun, GPR TV dapat menjangkau 60% lebih dari daerah perbatasan yang akan menerima informasi seputar pemerintahan.

Menurut hasil survei yang dilakukan tim GPR TV Oktober 2019 lalu, jangkauan pemirsa GPR TV baru mencakup sekitar 12% pada daerah 3T.

Maka dari itu, Kasubdit Audio Visual Direktorat Pengelolaan Media bercita-cita GPR TV ini bisa membuat *branding* yang lebih baik lagi. “Cita-citanya sih pengennya kita punya kayak Trans yang ada Trans Corporation. Kan kalau kita, bisa punya jadi GPR Network. Nah, nantinya, setiap instansi punya media sendiri punya konten sendiri. Kalau kita bisa berkolaborasi terus kayak begitu nanti kita bisa berada langsung sama swasta. Nah sambil mewujudkan itu semua kita juga akan terus meningkatkan kualitas siaran karena ya sekarang sudah eranya pertarungan bebas,” tutup Dimas.

GPR

TV



Strategi Hulu

Agregasi Konten Audio Visual

- Komunikasi publik terkait kebijakan & program pemerintah.
- Data & informasi kementerian dan Lembaga non-kementerian.
- Narasi tunggal kebijakan & program pemerintah kepada publik.



Strategi Hilir

Duplikasi Kanal

GPR TV disiarkan secara multiplatform dengan jangkauan siaran hingga ke daerah 3T Indonesia, lebih dari 10 juta rumah tangga (39 juta penonton*)

4 Cara Mudah Jadi Kontributor GPR TV



3 Program Kolaborasi GPR TV



Juru Bicara

Program dialog dengan tema program prioritas pemerintah, menghadirkan narasumber setingkat eselon 2 untuk memberikan informasi aktual kepada pemirsa.

Format talkshow dipandu oleh presenter, produksi dalam atau luar studio, berdurasi 30 menit yang terdiri dari 2 segmen.



Jelajah Nusantara

Sebuah tayangan *feature/magazine* berdurasi setengah jam yang bercerita tentang program prioritas pemerintah, baik yang sedang berjalan maupun sudah terlaksana di setiap daerah.

Program ini juga menampilkan kearifan lokal, potensi wisata, juga keunikan daerah tersebut.



Kabar Daerah

Siaran bersama oleh beberapa daerah/instansi berupa buletin berita pendek harian. Terdiri dari berbagai konten pendek yang dijahit menjadi sebuah program utuh berdurasi 1 jam.

Masing-masing instansi/daerah dapat menampilkan identitas logo pada konten yang diproduksi.

reach and engagement

Data per Juni 2019

i Indonesia
baik.id

1.812 post media sosial IB
menjangkau 54.346.036 pengguna
engagement sebanyak 3.792,857 kali.

54M reached

54 juta pengguna terjangkau melalui IG dan FB. Youtube dan Twitter tidak memiliki variabel reach

3.8M engaged

Terjadi 3.8 juta kali engagement di posting empat media sosial IB selama 6 bulan pertama 2019

Proporsi Bidang Berdasarkan Komentar

Maritim (11%)

dari 261 posting, bidang maritim dikomentari sebanyak 1.179 kali atau sekitar 5 komentar per posting

Ekonomi (11%)

dari 298 posting, bidang Ekonomi dikomentari sebanyak 1.129 kali atau sekitar 4 komentar per posting

PMK (19%)

dari 584 posting, PMK dikomentari sebanyak 2.040 kali atau sekitar 3 komentar per posting

**10.687
komentar**

Polhukam (59%)

dari 554 posting, bidang Polhukam dikomentari sebanyak 6.339 kali atau sekitar 11 komentar per posting. Angka ini jauh di atas PMK yang jumlah postingnya lebih banyak



5 tipe konten Indonesia Baik 2019

Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

KPPD 122

Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

PKK 60

Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

PIPJ 83

Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

EPA 26

Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

KNKP 108

INFOGRAFIS



MOTION



KOMIK



MINICLIP



CASUAL CONTENT



INDONESIA BAIK

GAET GENEREASI MILENIAL MELALUI BANK DATA PEMERINTAH

Sebagai peraih penghargaan World Summit on Information Society (WSIS) tahun 2018, Indonesia Baik terus berbenah meningkatkan keterikatan (*engagement*) dengan berbagai komunitas dan warganet di jagat siber. Kemasan data terkini yang menarik rupanya masih kurang menggaet minat kaum milenial untuk melirik salah satu akun yang berperan sebagai humas pemerintah tersebut.

Pemerintah memiliki beragam data, mulai dari yang paling terbaru hingga data sejarah Indonesia masa lalu. Namun, kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah itu biasanya menyajikan data-data dengan cara yang konservatif dan tidak bisa menarik minat pembacanya. Pembaruan data yang manual pun menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa cepat memberikan layanan informasi.

Maka dari itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) menyediakan sebuah kanal khusus yang akan mengemas konten berisikan data dan fakta seputar negara Indonesia terpercaya dengan cara yang menarik seperti melalui infografis, motiongrafis, komik, videografis dan lainnya.



Indonesia Baik sudah memulai 'bisnis' data pemerintah ini sejak 6 Juni 2017 dan telah berhasil menyabet gelar pemenang WSIS pada tahun 2018 di Geneva Swiss dalam kategori portal pemerintah yang viral-able sebagai sarana komunikasi kebijakan publik. Tim Indonesia Baik sangat bersyukur bisa menjadi pemenang dalam ajang penghargaan inisiatif bidang TIK yang telah bertarung di level dunia seperti ini.

Tidak berhenti di situ saja, Indonesia Baik masih mengejar berbagai target lain yang ingin segera dicapai. Salah satu perubahan dalam sistem pemerintahan yaitu kolaborasi, juga menjadi sebuah hal yang tak luput terlupakan sebagai langkah selanjutnya dalam pengelolaan portal



Indonesia Baik. Kepala Bidang Audio Visual Direktorat Pengelolaan Media Ditjen IKP Dimas Aditya Nugraha mengungkapkan bahwa Indonesia Baik masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.

“*Engagement*nya masih susah. Kita selalu mencari apa yang salah dalam pengelolaan Indonesia Baik, jadi kita sebetulnya masih banyak PR (red-pekerjaan rumah). Kalau dari sisi kuantitas, Indonesia baik sudah dapat banget tapi kualitas masih kurang nih jadi masih perlu ditingkatkan,” ujar Dimas.

Sepanjang tahun 2019 ini, Indonesia Baik sudah berhasil memproduksi 979 konten yang terdiri dari Infografis, Motiongrafis, Komik, *Casual Content* dan *Mini Clip*. Bahkan, Indonesia Baik juga memiliki 4 klasifikasi pilar konten informasi yang akan disajikan secara harian, mingguan dan bulanan mulai dari program-program pemerintah, *daily issue*, edukasi informasi dan tentang Indonesia.

Sebagai salah satu *campaign* untuk meningkatkan *engagement* dengan generasi milenial, Indonesia Baik sejak awal tahun 2019 sudah membuat kampanye bernama #YangMudaSukaData. Hal ini dikarenakan target pembaca dan *target audience* Indonesia Baik berumur 20 tahun hingga 34 tahun. Jadi, penyajian data yang dikemas menarik ini disesuaikan dengan target tersebut yang bisa dikatakan juga sebagai generasi milenial.

Meski dikelola pemerintah, Indonesia Baik ini menganggap Kata Data dan Good News From Indonesia (GNFI) yang bisa dikatakan sebagai portal media online adalah saingan mereka. Terlampir dalam laporan semester sosial media, Indonesia Baik menyandingkan perbedaan total pengikut dari 2 kompetitornya tersebut. Secara statistik, Indonesia Baik masih unggul dari akun Kata Data di Instagram, tapi tetap masih kalah dari akun GNFI. Begitu juga dari akun Facebook Indonesia Baik memang lebih unggul dari akun GNFI tapi masih kalah jauh dari akun Facebook Kata Data.

Berbagai cara sudah dilakukan Indonesia Baik untuk meningkatkan keterikatannya dengan warganet melalui akun Facebook, Instagram, Youtube dan Twitter. Bukan hanya konten, tim Indonesia Baik juga sudah membuat pelatihan dan *workshop* keliling kampus di seluruh Indonesia. Kalau tahun 2018 dan 2019 sasaran mereka adalah masyarakat umum (pelajar, mahasiswa, dll), tahun 2020 Indonesia Baik akan mulai sasar Aparatur Sipil Negara. Peralunya, target peserta ASN ini nantinya diharapkan sesuai pelatihan mereka bisa menggunakan ilmu yang sudah diberikan untuk membuat konten masing-masing instansi mereka.

Ke depannya, Indonesia Baik juga membuat target timnya akan menjadi tutor pemagangan bagi ASN yang dilatihnya



tahun depan. Jadi, bukan hanya teori saja, para peserta pelatihan tahun 2020 akan diberikan kesempatan langsung untuk terjun menjadi salah satu tim Indonesia Baik yang bisa memproduksi hampir 3 konten setiap harinya.

“Sampai tahun ini kita masih ke kampus-kampus. Tetapi mulai tahun depan, kita mau geser target kita jadi ASN. Kalau ASN, mereka bisa berguna untuk instansi mereka sendiri,” tambah Dimas.

Kecepatan penyajian data dan ketepatan data menjadi kunci utama dalam daya tarik untuk kaum milenials. Kelas *workshop* dan pelatihan Indonesia Baik dikemas dalam bentuk program *Sohib Berkelas* yaitu Sobat hebat Indonesia Baik berkegiatan di kelas. Bukan hanya kelas tatap muka saja, *Sohib Berkelas* juga sudah dilakukan secara online melalui *platform instant messaging* Whatsapp maupun Telegram.

“Kelas onlinenya kita kasih mereka materi selama 16 minggu. Jadi, materinya sudah kami siapkan dengan baik. Nah, setiap Rabu kita kasih mereka penugasan dan setiap pemenang yang memiliki nilai paling tinggi dalam kelas tersebut kita langsung kasih pulsa 100 ribu rupiah,” tutur Dimas.

Walaupun ribuan orang sudah tergabung dan terdaftar dalam kelas online *Sohib Berkelas*, rupanya konten yang diproduksi, diunggah setiap minggunya oleh para peserta *Sohib Berkelas* hanya kurang dari 2% nya saja. Setelah direview selama 8 minggu pertama, kegiatan *workshop* online

ini banyak diminati karena banyak peserta yang mencoba-coba saja. Kelas online yang gratis dan mudah dijangkau (hanya tinggal masuk grup) rupanya bukanlah menjadi jaminan Indonesia Baik bisa meningkatkan keterikatan *target audience* dengan produk-produknya.

Konten infografis yang disajikan Indonesia Baik sudah cukup dinamis. Kemasan informasinya pun beragam mulai dari penyajian data pemerintah dalam bentuk infografis hingga konten yang dibutuhkan dan disukai oleh warganet sehari-harinya seperti konten “*how to*”. Jadi, selain menjadi bank datanya pemerintah, Indonesia Baik juga sudah berusaha hadir menjadi portal informasi ‘kekinian’ dan anti hoaks.





DISEMINASI PROGRAM PEMERINTAH ALA BURUNG KOLIBRI

▶▶▶▶

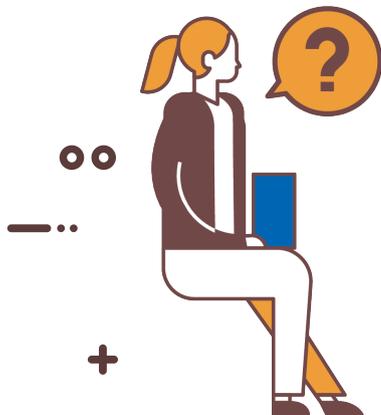
Dalam menjalankan perannya sebagai *Government Public Relations (GPR)*, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo mengelola akun resmi LINE @Kemkominfo. Sejak lahir di tahun 2017, akun dengan penjenamaan (*branding*) Kolibri (Kemkominfo Lintas Berita Terkini) ini secara rutin memproduksi dan mendiseminasi berbagai program dan kebijakan pemerintah, mengemas ratusan kebijakan yang sarat bahasa serius dengan gaya

muda kekinian. Tujuannya hanya satu, memastikan generasi muda paham atas kinerja pemerintah Indonesia.

Selasa (19/11/2019) siang, Tim KominfoNext berkesempatan mewawancarai pengelola akun resmi LINE @kemkominfo tersebut. lalah Yessica Bernadeta dan Jabbar Saputra, dua dari empat pengelola akun dari Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK) Direktorat Jenderal IKP, yang menjadi sutradara di balik konten-konten Kolibri

selama ini. Selain Yessica dan Jabbar, tim pengelola akun resmi LINE @Kemkominfo juga terdiri dari Marroli J. Indarto dan Tsurayya Ghaida yang semuanya berasal dari Direktorat IKPMK.

Obrolan dengan Yessica dan Jabbar siang itu diawali dengan penjelasan singkat atas awal mula lahirnya akun resmi LINE @kemkominfo, alasan memilih aplikasi pesan instan asal Jepang tersebut sebagai kanal diseminasi informasi, hingga latar belakang penjenamaan akun dengan nama burung Kolibri.



Bisa diceritakan kenapa memilih LINE sebagai kanal diseminasinya IKP?

Perannya Kominfo itu kan (salah satunya) sebagai GPR. Sesuai Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015, Kominfo punya peran mendiseminasikan program dan kebijakan pemerintah dari semua kementerian/lembaga. Kita butuh berbagai macam kanal, karena masing-masing orang umumnya menggunakan kanal yang berbeda untuk mencari informasi. Jadi variasi kanalnya memang harus kita perhatikan banget untuk menyasar target yang sesuai.

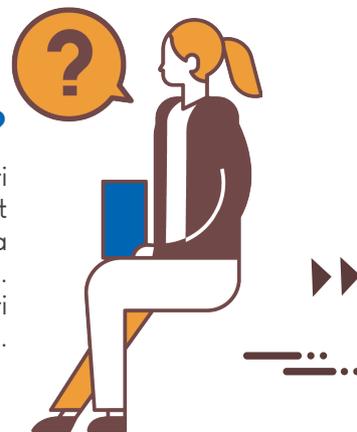
Kenapa LINE, karena memang target kita spesifik di anak muda sebagai pengguna media sosial terbanyak. Salah satu kolam terbesar yang targetnya spesifik adalah LINE ini. Kalau di IG (Instagram) dan Facebook, orang yang *follow* pun bisa aja nggak baca (kontennya, red.). Kalau LINE ini, semua *message* yang kita sebar langsung sampai ke *subscriber*, jadi memang pesannya *direct*.

Kelebihan utama pake LINE itu, dia punya fitur-fitur yang memungkinkan kita lebih interaktif ke orang. Misalnya rich *message* yang ada di chat room, yang kalau diklik langsung *redirect* ke halaman yang dituju, yakni di timeline. Juga bisa ada live chat, semacam *open chat* yang ketika kita aktifkan di satu momen, semua orang bisa nanya ke kita.



Kenapa namanya Kolibri?

Kemkominfo Lintas Berita Terkini atau Kolibri itu kita ambil dari nama burung. Burung Kolibri itu cepat, kecil, dan bermanfaat karena dia membantu penyerbukan. Jadi kita berharap semua informasi yang kita share di sini bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi informasi yang kita share itu ya sesuai dengan burung Kolibri ini, cepat dan bermanfaat.

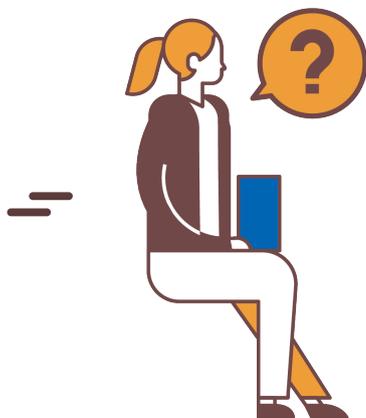


Konten seperti apa yang disuguhkan di Kolibri?

Karena targetnya anak muda, kita pake jenis kontennya infografik dan videografik. Pemakaian warna juga macam-macam, *colorful*, supaya mereka tertarik melihat isinya. Kan orang lihat visualnya dulu baru tertarik kontennya.

Selain infografik dan videografik, Kolibri juga punya segmen Kontemplatif (Kemkominfo Teman Ngobrol Paling Asik dan Informatif), sesi tanya jawab dengan Menteri/Kepala Lembaga. Kita saring dulu pertanyaan dari *subscriber*, lalu kita tanyakan ke Menteri terkait dalam bentuk video. Sampai saat ini sudah pernah 3 kali produksi, dengan Pak Rudiantara saat masih menjabat sebagai Menkominfo, Pak Airlangga sebagai Menteri Perindustrian, dan terakhir Bu Nila Moeloek Menteri Kesehatan.

Selain Kontemplatif, juga ada kuis #SeninMain, konten yang juga masih bahas soal program pemerintah yang dikemas dalam bentuk kuis, bisa tebak kata, teka teki silang, cari kata, acak





gambar. #SeninMain ini biasanya dipakai untuk program-program yang kurang *relate* langsung ke kehidupan anak-anak muda ini. Misalnya bahas soal Program Keluarga Harapan, Tol Laut, Program 1 Juta Nelayan.

Itu kan kurang *relate* langsung ke mereka, tapi mereka tetap harus tahu pemerintah punya program ini untuk menanggulangi kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi kalau kami buat infografiknya, mungkin *engagement*-nya kecil, jadi kalau disajikan dalam bentuk kuis, informasinya bisa lebih “kemakan” sama anak-anak muda ini. Lalu ada Kuis Seru di Malam Minggu yang topiknya lebih umum seperti fun fact dan ensiklopedia.

Ada satu lagi jenis konten yang baru di-*launching*, yaitu #SelasaBahasa Padanan Kata Kolibri. Konten ini hasil kerja sama dengan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud untuk edukasi ke *subscriber* tentang padanan istilah yang

sudah dibakukan. Misalnya *creambath*, sudah ada padanan katanya yaitu langir krim. Atau *bedrest* = tirah baring.

Tujuan kita mengedukasi, Kemendikbud kan ada program bagaimana orang lebih mencintai Bahasa Indonesia, kita dukung itu melalui konten-konten Padanan Kata Kolibri yang tayang tiap hari Selasa.

Selain diseminasi juga ada Chatbot Anti Hoaks. Para *subscriber* bisa cek klarifikasi isu hoaks di sini, dengan ketik @kemkominfo lalu disambung dengan minimal 4 *keyword*, misalnya @kemkominfo hoaks bom medan. Nanti akan keluar link-link berita terkait, yang sumber verifikasinya diambil dari kominfo. go.id, stophoax.id. Pengelolanya ini dari Ditjen Aptika, yang juga punya Chatbot Anti Hoaks di Telegram, selain di LINE. Jadi bukan cuma diseminasi pemerintah aja, akun resmi LINE @Kemkominfo ini juga menjalankan tugasnya Kominfo untuk penanganan konten negatif.

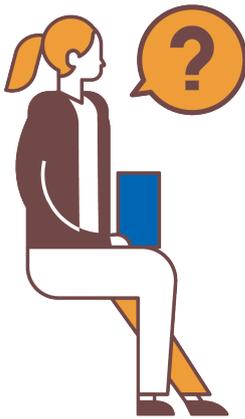


Seperti apa tantangannya, ngomongin program pemerintah di kanal yang “anak muda banget?”

Memang cukup *challenging* ya, kan kebijakan pemerintah itu kadang cukup berat untuk dibahasakan ke anak muda, kayak ngomongin tentang Utang Negara, penanggulangan kemiskinan, tentang nelayan. Kami harus kemas itu dengan baik, membuat *agenda setting* sedemikian rupa supaya anak mudanya ngerti. Kami gunakan kata-katanya benar-benar santai dan nggak kaku, lalu di-*mix* dengan bahasa sehari-hari mereka, gimana caranya supaya mereka tetap ngerti.

Kaya waktu itu ngomongin Program Keluarga Harapan (PKH), mungkin topiknya nggak relate sama mereka, tapi mereka harus tahu bahwa pemerintah punya program itu, negara hadir menanggulangi kemiskinan. Jadi kita kemas dalam bentuk kuis #SeninMain tadi.

Rata-rata per bulan kita naik di 10-15 ribu *subscriber*. Iklim di LINE ini beda ya, di sini orang nanya beneran karena mau nanya. Misalnya konten Padanan Kata Kolibri tentang *flash disk* = diska lepas, banyak yang komen tapi sesuai konten. Artinya mereka benar-benar mengerti konten ini tentang apa, dan menurut kami ini sebuah *achievement* yang patut dibanggakan bahwa mereka baca konten Kolibri, bukan cuma *scanning* konten aja.

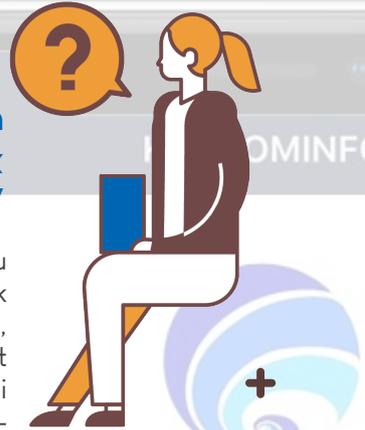


Mekanisme penyusunan kontennya seperti apa?

Biasanya kita udah *plotting* dari Senin sampe Jumat itu temanya apa aja. Pemilihan topik, kita rembugin dan monitoring sendiri, baru menghubungi K/L (Kementerian/Lembaga) untuk minta materi sekaligus verifikasi. Semua materi kita pasti dapatnya dari K/L, atau Indonesia.go.id, kominfo.go.id, dll. Kita pake sumber-sumber yang sudah A1, jadi semua materi bisa dipertanggungjawabkan.

Kami punya tim konten sendiri untuk yang produksi *copywriting* dan desain. Kami juga turun langsung untuk supervisi dan *approval* kata per kata konten yang akan naik, terutama (proses) klarifikasi materi karena jualan kita adalah kontennya bebas hoaks.

Biasanya memang kita ngomonginnya *current issue* yang lebih berumur panjang. Tapi di tengah-tengah perjalanan, jika ada konten insidentil, selama dia belum diupload ya kita masih bisa tukar dengan konten lainnya. Kayak isu meninggalnya almarhum Bapak BJ Habibie itu kita menukar dengan konten yang akan tayang di minggu ini untuk dinaikkan di minggu depan. Atau saat Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-22, itu kan naik tiba-tiba, nah dalam minggu yang sama kami naikin isu tersebut.

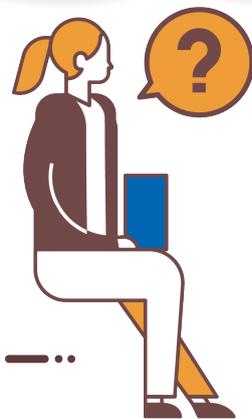


Recent media

Balapan kata
KOLIBRI
TOPIK: TRANSPORTASI

PENTINGNYA COLD STORAGE
BANTU BELAJAR INDONESIA
TENTANG BELANJA ASUN
MUNGKIL BELAJAR ASUN
MUNGKIL BELAJAR ASUN

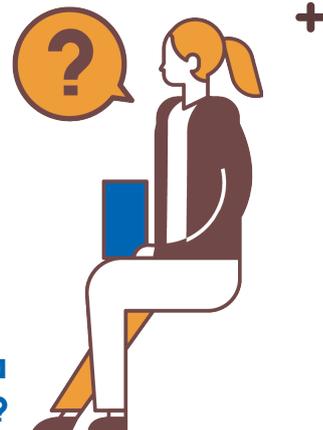
BTS
SELAMAT HARI
Padanan Kata
KOLIBRI
TOPIK: BELANJA



Sebagai kanal GPR, apakah Kolibri juga kerja sama dengan K/L lain?

Selain Padanan Kata Kolibri yang sudah bekerja sama dengan Kemdikbud yang sudah jadi konten regular, dari K/L juga suka ada permintaan publikasi konten tentang event. Misalnya dulu pernah *campaign* Kemenko Maritim tentang Gerakan Indonesia Bersih yang ada maskotnya, mereka minta materinya untuk memperkenalkan si maskot ini sekaligus ajakan-ajakan untuk menjaga pantai.

Atau Kemdikbud juga misalnya, kalau punya acara yang sasarannya anak muda, misalnya kompetisi film untuk anak-anak sekolah. Karena dari awal kita memperkenalkan LINE @kemkominfo spesifik menyasar golongan muda, jadi yang melihat infografik dan materi-materi kita pun sesuai dengan target market mereka.



Dua setengah tahun berdiri, apa saja capaiannya?

Sampai sekarang kita masih jadi salah satu dari dua akun resmi (Official Account) pemerintahan yang ada di LINE. Baru aja disusul sama Bekraf. Di LINE ini, pembuatan akun resminya beda dengan Facebook, Twitter, Instagram yang cukup registasi sendiri terus tinggal verifikasi. Sedangkan untuk mendapatkan akun resmi LINE @Kemkominfo ini, kami harus bersurat resmi ke LINE Corp. di Indonesia. Jadi sistemnya kerja sama. Akun resmi ini merupakan hasil kerja sama Kemkominfo dengan LINE Corp.

Beberapa kementerian coba bikin tapi (tipenya) akun personal, fiturnya terbatas. Kalo akun resmi, apapun yang kita blast itu langsung di-*push notification* masuk ke *handphone* masing-masing *subscriber*. Itu yang membedakan akun resmi LINE @Kemkominfo sama akun-akun lain.

Lalu LINE setiap hari itu merilis *Ranking* untuk akun-akun official, ngeliat Top 100 Official Account di Indonesia itu apa aja, dan akun resmi LINE @Kemkominfo masuk ke situ. Biasanya kita di Top 40 atau Top 30.

Rankingnya based on engagement, dan berapa banyak orang yang *add* kita saat itu. Persaingannya dengan akun-akun yang sifatnya komersil, atau akun-akun *fanbase* yang memang tujuannya menggaet fans, sementara kita isinya cuma info tok. Jadi ini sebuah prestasi yang perlu kita banggakan juga.



Ada target ke depan?

Memvariasikan jenis konten. Kita nggak mau *stuck* kontennya itu-itu aja karena kan lama-lama orang akan bosan, cuma bentuknya videografik infografik untuk bahas program pemerintah. Ketika orang nggak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di situ, nggak mengaplikasikan momen tren konten yang ada sekarang, apa artinya. Makanya kita mau membuat LINE ini *as a media* yang kita pikirkan matang-matang dari awal strateginya gimana, manajemen, dan evaluasinya seperti apa. Mana (konten) yang berhasil mana yang nggak, mana yang perlu kita lanjutin.

Harapannya ke depan bisa kolaborasi dengan banyak lagi kementerian dan lembaga. Kalau sekarang baru kolaborasi regular sama Kemdikbud, *hopefully* tahun depan bisa kolaborasi lebih banyak lagi, jadi variasi konten kita juga lebih banyak. Kerja Bersama-nya lebih kelihatan.



PASUKAN 'BHAYANGKARA' CITRA DAN REPUTASI BANGSA

Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) adalah suatu wadah profesi kehumasan pemerintah yang sekaligus merupakan mitra strategis Kementerian Kominfo dalam bidang humas pemerintah. Dalam Iprahumas, secara tidak langsung, Pranata Humas Indonesia diharapkan untuk dapat menjadi 'Bhayangkara' dalam pembentukan citra dan reputasi bangsa.

Melalui Iprahumas, pranata humas ditantang untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh elemen organisasi Humas untuk re-branding Humas Pemerintah dan profesi Humas di Indonesia. Hal itu juga untuk menunjukkan bahwa para Pranata Humas bekerja sebagai *expert communicator* dalam sistem Kehumasan Pemerintah. Sinergi dan kolaborasi dilakukan antara lain dalam menyebarluaskan narasi tunggal atau

program-program yang menjadi fokus tiap Kementerian/ Lembaga/ Daerah (KLD), juga kontra narasi untuk informasi *hoax*.

Sebagai mitra strategis, Iprahumas juga berfungsi sebagai mitra Pembina Pranata Humas yang secara khusus berada di Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo. Iprahumas turut mengawali pembahasan regulasi pranata humas, penghubung pranata humas, dan pengawas etika pranata humas.

Iprahumas secara resmi menjalin kerja sama dengan berbagai pihak antara lain dengan pemerintah, media, perguruan tinggi (Jurnal PRofesi), komunitas. Sebagai wadah

perkumpulan Pranata Humas se-Indonesia, para Pranata Humas Indonesia dapat saling bertukar pikiran dan berdiskusi tentang hal kehumasan pemerintah. Beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan Iprahumas yaitu Kelas Belajar Iprahumas, Call for Paper Pranata Humas, Konvensi Humas Pemerintah, GPR Summit, Aksi Viral, Speech Act, dan Klinik Angka Kredit Online.

Anggota Iprahumas tersebar di berbagai KLD. Semua Jabatan Fungsional Pranata

Humas (JFPH) diwajibkan terdaftar sebagai anggota organisasi profesi. Semua anggota memiliki kartu keanggotaan. Keaktifan anggota ditandai dengan Surat Keputusan keanggotaan yang diterbitkan setiap tahun oleh Iprahumas. Jumlah pranata humas per 25 September 2019 adalah 775 orang namun tidak semua KLD memiliki pranata humas. Saat ini Iprahumas memiliki cabang di Jakarta Wilayah 1 (dulunya bernama PC LAN), Provinsi Jawa Timur, Kementerian Kominfo, dan Provinsi Bangka Belitung.

Tantangan dan Harapan

Pranata humas memiliki risiko pekerjaan yang tinggi. Bukan hanya harus memiliki stamina fisik yang sehat dan kuat, pranata humas harus terlatih mental dan tercukupi kognisinya. Pranata humas harus sangat berhati-hati menjalankan tugasnya, terutama saat menangani krisis komunikasi. Selain itu, ketika harus bertugas meliput di lapangan, pranata humas perlu difasilitasi perlengkapan yang menunjang pekerjaannya.

Tantangan pertama bagi pembina pranata humas dan Iprahumas adalah memotivasi anggota Iprahumas untuk bekerja optimal di instansi masing-masing walau pada kenyataannya dihadapkan tunjangan fungsional yang belum disetarakan seperti

tunjangan fungsional lain yang sudah mengalami penyesuaian lebih dulu.

Tantangan kedua adalah memotivasi dan mengadvokasi anggota agar tetap bekerja walaupun bukti-bukti pekerjaan humas digital belum dapat diklaim untuk mendapatkan angka kredit. Butir-butir kegiatan pranata humas sebaiknya segera direvisi, menyesuaikan perkembangan zaman. Aktivitas membuat film, vlog, tulisan ilmiah tingkat internasional, dan yang terkait dengan kerja PR Digital di media sosial, adalah contoh butir-butir pekerjaan yang belum terakomodir dalam aturan resmi tentang bukti fisik dan angka kredit hingga saat ini.

Penghitungan satuan angka kredit juga perlu ditinjau kembali agar harapan pranata humas untuk dapat naik pangkat dua tahun sekali dapat terwujud bukan hanya pada pranata humas di instansi pusat saja.

Tantangan ketiga adalah menjangkau anggota pranata humas dari berbagai provinsi untuk bergabung dalam Iprahumas dan membantu instansi pembina dalam menyosialisasikan peraturan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. Pranata humas masih banyak yang tidak/ belum paham bagaimana cara menyusun Daftar usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), teknis pelaksanaan uji kompetensi kenaikan tingkat, standar prosedur proses penilaian, standar kompetensi untuk para pranata humas, dan kendala-kendala yang bersifat kasuistik.

Idealnya, Kementerian Kominfo secara intens melakukan sosialisasi dan mengupdate informasi, melalui Iprahumas khususnya. Update informasi tentang perubahan aturan, tata cara, dan sebagainya perlu dilakukan secara khusus dan berkesinambungan agar ada keseragaman informasi dan pengetahuan.

Di balik tantangan-tantangan, tentu saja ada harapan agar pranata humas lebih maju dan berdaya saing. Pranata Humas berpotensi untuk dikondisikan menggantikan fungsi Tenaga Humas Pemerintah, tentunya melalui tahap seleksi dan pembekalan yang cukup. Selanjutnya, pemberian anugerah kepada Pranata Humas Indonesia dari Kominfo diharapkan terwujud sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan yang formal bagi entitas Pranata Humas Indonesia.



Sekilas Iprahumas

Iprahumas lahir pada 27 Agustus 2015 melalui Kongres I Pranata Humas di Bandung. Pada saat itu belum seluruh Pranata Humas di Indonesia mendaftarkan diri menjadi anggota Iprahumas. Selanjutnya pada 2017, terbitlah Peraturan Pemerintah No.11/2017 tentang Manajemen PNS, di

mana salah satu pasalnya menekankan bahwa setiap pejabat fungsional wajib terdaftar sebagai anggota organisasi profesi yang sesuai dengan fungsionalnya masing-masing. Masa kepengurusan berjalan tiga tahun dan Iprahumas melanjutkan kepengurusan periode 2018-2021. Kongres

II Pranata Humas disatukan dalam rangkaian Konvensi Humas Pemerintah pada 7 September 2018 di Bogor. Iprahumas mempunyai media social; @iprahumasindonesia (Instagram), Pranata Humas Indonesia (Facebook), dan @pranatahumas (Twitter).

Oleh:



Dr. Dyah Rachmawati Sugiyanto

(Ketua Umum Ikatan Pranata Humas Indonesia periode 2018-2019, Pranata Humas Madya - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Follow Us

Click Here



Direktorat Informasi dan Komunikasi Bidang PMK



infokompmk



@infokompmk



@infokompmk



Saku informasi



@sakuinformasi
@genposting



@sakuinformasi
@genposting
@pojokliterasidjkip



Indonesia Baik



IndonesiaBaik.Id



@indonesiabaik.id



@IndonesiaBaikId



IndonesiaBaikID



FMB9



fmb9.id



@fmb9.id



@fmb9id_



FMB9ID_IKP



JPP



JppIndonesia



@JppIndonesia



@jpp.go.id



Info Publik



InfoPublikKemKominfo



@infopublik.id



publikinfo



InfoPublik



Museum Penerangan



Museum Penerangan



@museumpenerangan



@muspen_kominfo



Muspen TV



Monumen Pers



Monumen Pers Nasional



@monumenpers



@monumenpers



@kanal.indonesia.go.id



@komik_komunika



@bakohumas



GPR TV



@gprtv.id



@gprtv



gprtv.id

KOMINFO TERIMA ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK 2019



Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif. Didampingi Menteri Kominfo Jhonny G. Plate dan Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memberikan penghargaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti.

Wapres Ma'ruf Amin mengucapkan selamat kepada badan publik yang telah berhasil mendapatkan penghargaan dengan memenuhi kualifikasi Cukup Informatif, Menuju Informatif, dan Informatif. Dalam sambutan, Wapres juga mengingatkan arti penting keterbukaan dan transparansi bagi badan publik untuk mendukung visi pemerintah.

"Memberikan informasi kepada publik adalah sebuah kewajiban dari badan publik. Keterbukaan dan transparansi bagi badan publik untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya," ungkapnya dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Selain itu, Wapres mengharapkan agar badan publik juga meningkatkan kualitas konten informasi yang disajikan kepada masyarakat. "Saya minta agar badan publik tidak sekadar memberikan akses informasi saja, namun juga meningkatkan kualitas konten yang disampaikan kepada masyarakat. Tantangan ke depan tidak terbatas pada akses informasi,

namun pada konten informasi yang harus ditingkatkan kualitasnya," tegasnya

"Memberikan informasi kepada publik adalah sebuah kewajiban dari badan publik. Keterbukaan dan transparansi bagi badan publik untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya," ungkapnya

Selaras dengan sambutan Wakil Presiden RI, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyebutkan bahwa keterbukaan informasi ini harus bisa dijadikan sebagai budaya. "Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya, maka otomatis *mindset*-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik," kata Ketua KIP Gede Narayana.

Sebagai salah satu amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kominfo terus meningkatkan pelayanan informasi publiknya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang juga diharapkan sebagai gerbang layanan informasi secara digital maupun secara langsung atau tatap muka.

Kementerian Kominfo berhasil menjadi satu dari 11 badan publik Kementerian yang mendapatkan penilaian informatif. Penilaian ini didapatkan dari dua indikator utama yaitu pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat

diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Kualifikasi informatif ini juga diberikan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019.

Adapun 6 kategori yang diberikan penghargaannya oleh Komisi Informasi Pusat antara lain adalah Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Kategori Badan Publik Lembaga Non-Struktural, Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi, Kategori Badan Publik Badan Usaha Milik Negara, Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri, dan Kategori Badan Publik Partai Politik. Acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 yang dilaksanakan di Istana Wakil Presiden ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan partai politik.



Sumber foto: kominfo.go.id

SUMBER

<https://techno.okezone.com/read/2019/11/22/207/2133073/kominfo-terima-anugerah-keterbukaan-informasi-badan-publik-2019>

KEMKOMINFO AKAN BANGUN 3.447 BTS UNTUK DUKUNG SMART CITY PADA 2020

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mendukung penuh gerakan *smart city* di seluruh Indonesia. Menkominfo Johnny G. Plate menyebut, salah satu dukungannya adalah dengan pembangunan 3.447 BTS pada 2020.

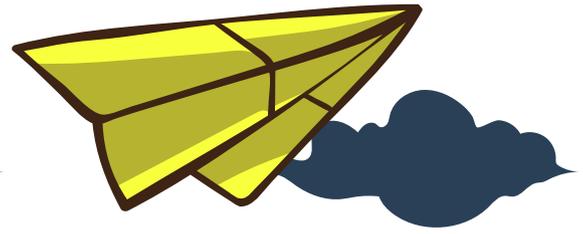
Hal ini dilakukan karena ia yakin, melalui penambahan infrastruktur digital, ke depannya bakal makin banyak kota atau kabupaten yang menerapkan konsep *smart city*.

Untuk itu Kemkominfo bakal membangun lebih banyak infrastruktur pendukung, dalam hal ini pembangunan BTS dan persiapan peluncuran satelit multifungsi.

Bagian Kemkominfo terkait infrastrukturnya. Di samping yang sudah ada (*existing*), Kemkominfo sudah lakukan pembangunan *backbone* serat optik Palapa Ring, juga membangun BTS di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Untuk BTS, rencananya akan bangun 5.000, sekarang sudah ada 1.500 BTS dan pada 2020 rencananya ada 3.447 BTS lagi," kata Johnny di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Di samping itu, Johnny memperkirakan pada 2021 atau paling lambat 2022, pemerintah sudah meluncurkan satelit multifungsi (*high throughput satellite*).

"Sehingga pada 2024, satelit bisa berfungsi," ucapnya menambahkan.



SMART CITY BERKEMBANG DINAMIS

Soal *smart city*, Johnny mengaku pemerintah kini tidak lagi menargetkan berapa jumlah *smart city* yang akan muncul pada 2020.

Pasalnya, kota cerdas berkembang secara dinamis, seiring dengan perkembangan infrastruktur di setiap kota dan kabupaten.

“Kota cerdas itu berkembang secara dinamis, jadi tidak ada kata selesai. Yang ada hanyalah perbaikan-perbaikan, sehingga yang kami lakukan adalah evaluasi perkembangan,” tutur dia

100 SMART CITY

Menurut menteri yang merupakan politikus partai Nasdem itu, saat ini sudah ada sekitar 100 *smart city* di kota dan kabupaten seluruh Indonesia dari pulau Jawa, Sumatera, sampai ke Papua.

Misalnya, pada 2017 Kemkominfo mencatat sudah ada 25 kota/kabupaten *smart city*. Kemudian, pada 2018 ada 50 kota/kabupaten yang menerapkan konsep *smart city*. Selanjutnya tahun ini, ada 25 kota/kabupaten yang bertransformasi jadi *smart city*.

la menyebut, pekerjaan pemerintah masih banyak untuk mendukung *smart city*. Pasalnya, masih ada 400 kota/kabupaten yang belum menerapkan konsep *smart city*.

“Dibutuhkan kolaborasi, kita bergerak bersama untuk itu,” ujarnya.

SUMBER

<https://www.liputan6.com/teknologi/read/4104364/kemkominfo-akan-bangun-3447-bts-untuk-dukung-smart-city-pada-2020>



JawaPos.com – Kecepatan internet di Indonesia dinilai bakal meningkat tahun-tahun mendatang. Bahkan kecepatannya tembus pada 30 Mbps. Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate saat acara Google for Indonesia (Google4ID) di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut dia, pada 2035 mendatang, kecepatan internet rata-rata di Indonesia akan tembus di kisaran 30 Mbps. Bukan tanpa alasan, transisi ke dunia digital hingga kini tak terelakkan lagi. “Visi Indonesia menuju negara digital. Kita punya visi menyiapkan Indonesia di 2035 infrastruktur digital sudah memadai. Kita harapkan pada 2035 kecepatan internet kita sudah pada 30 Mbps,” ujarnya demikian.

Dengan internet yang cepat, dirinya meyakini bahwa hal tersebut akan semakin memudahkan kegiatan berselancar di dunia digital Indonesia. Hal tersebut juga disebutnya akan semakin membawa kontribusi besar pada aspek ekonomi digital di Indonesia.

“Pemerintah akan membangun tiga satelit. Untuk memastikan bisa mencapai 30 Mbps. Sampai akhir periode ini (2024) akan ada satu satelit supaya level internet bisa 10 Mbps. Backbone telekomunikasi di dataran dan laut dari Palapa Ring, fiber optik, dan ribuan BTS akan mendukung Indonesia menuju negara digital,” tegas Johnny.

Selain itu, untuk mendukung misi kecepatan rata-rata internet di Indonesia bisa tembus 30 Mbps pada 2035, Sekjen Partai Nasdem itu juga akan melakukan pengaturan ulang frekuensi. “Kita akan atur ulang. Itu non renewable. Hanya bisa reuse. Akan ditata frekuensi yang mungkin 2G, 3G pindah ke 4G termasuk revolusi digital ke 5G. Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah ketersediaan *digital talent*,” tandasnya.

KECEPATAN RATA-RATA INTERNET INDONESIA SAAT INI

Terkait misi mencapai kecepatan internet rata-rata di Indonesia menjadi 30 Mbps pada 2035, lantas berapa kecepatan internet rata-rata di Indonesia saat ini? Juni lalu, OpenSignal merilis laporan koneksi 4G secara global. Dibandingkan dengan negara lain, kecepatan internet Indonesia memang tak cukup baik.

Pada Februari 2019 misalnya, Indonesia duduk di posisi ke-74 dari 77 negara dengan kecepatan internet download paling tinggi 18,5 Mbps dan paling rendah 5,7 Mbps. Sedangkan per Mei, Indonesia berada di peringkat 73 dari 87 negara dengan kecepatan internet rata-rata 6,9 Mbps.

Kendati belum pantas dipuji, kecepatan internet rata-rata di Indonesia masih lebih baik dari negara tetangga, seperti Thailand, Kamboja, maupun India hingga Bangladesh. Tetapi, jika dibandingkan dengan Singapura, Filipina, Vietnam, atau Myanmar, Indonesia untuk kecepatan internetnya memang terbilang payah.

Adapun dalam laporan OpenSignal per Mei lalu itu, Korea Selatan (Korsel) menduduki peringkat teratas sebagai negara dengan koneksi internet terbaik. Korsel memiliki kecepatan internet rata-rata hingga 52,4 Mbps.

Sementara untuk internet kabel, berdasarkan laporan Ookla, rata-rata kecepatan internet di Indonesia menduduki peringkat 42 dari total 46 negara lain. Hasil ini diperoleh dari data Ookla pada Desember 2018.

Rata-rata kecepatan internet kabel di Indonesia adalah 15,5 Mbps, sementara rata-rata kecepatan internet kabel dunia sebesar 54,3 Mbps. Kecepatan ini rata-rata mengalami kenaikan 33 persen tiap tahun.

Sementara untuk internet mobile atau seluler, masih menurut Ookla, Indonesia kembali menduduki peringkat buncit. Dari 45 negara, Indonesia berada di peringkat 43. Kecepatan internet seluler Indonesia tercatat sekitar 10,5 Mbps. Sementara rata-rata kecepatan internet seluler dunia ada di angka 25,1 Mbps dan naik 18 persen tiap tahunnya.

SUMBER

<https://www.jawapos.com/oto-dan-teknoteknologi/20/11/2019/menkominfo-kecepatan-rata-rata-internet-indonesia-30-mbps-pada-2035/>



MENKOMINFO:

ASN GARDA TERDEPAN AGENDA KEBANGSAAN

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menegaskan bahwa tugas aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya sebagai mesin penggerak roda pemerintahan. Lebih dari itu, para abdi negara wajib mendukung jalannya agenda kebangsaan.

“ASN dituntut memberikan kontribusi kepada negara. (Sebagai) Garda terdepan dari dukungan atas jalannya politik bangsa dan negara kita adalah para ASN,” kata Johnny di acara *Launching* aduanasn.id dan Penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurutnya, peran strategis ASN yakni didukung oleh SDM yang mempunyai keterampilan, *skill knowledge* serta *scientific* yang memadai. Disamping itu, ASN juga perlu menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

“Tetapi juga didukung dengan semangat kebangsaan, nasionalisme yang tinggi, budi pekerti, etika dan humaniora yang memadai. Hadirnya ini semuanya dalam rangka memastikan ASN kita menjadi ASN yang unggul,” imbuhnya.

Presiden Jokowi, lanjut Johnny, juga telah menyampaikan pemerintahan kali ini dihadapkan dengan situasi dunia yang tidak terlalu bersahabat. Salah satunya, aksi bilateral dari negara-negara adidaya yang mengakibatkan perang dagang.

“Karenanya, para ASN ini dituntut juga untuk mampu memberikan yang terbaik untuk diisi oleh tokoh-tokoh aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan juga jiwa dan semangat kebangsaan yang kuat,” tambahnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, negara ini memerlukan kekuatan domestik, membangun stabilitas, kekerabatan dan juga persatuan bangsa. “Garda terdepannya adalah ASN di semua aspek kehidupan penyelenggara negara dan pemerintahan,” pungkasnya.**

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan saat ini Pemerintah Indonesia membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas unggul agar Bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain.

“Kualitas SDM ASN menjadi penting karena ASN merupakan garda terdepan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemerintahan kabinet Indonesia Maju yang baru saja diawali ini, dihadapkan dengan situasi dunia yang tidak terlalu bersahabat,” kata Menteri Johnny dalam acara *Launching* Portal Aduan ASN dan Penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Selasa (12/11/2019).

Menurut Menteri Kominfo ASN yang berkualitas tidak hanya memiliki intelektualitas tinggi, namun perlu memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme disertai dengan budi pekerti dan etika yang baik. “Para ASN harus memiliki rasa nasionalisme karena terkait dengan kestabilan dan keamanan negara yang pada akhirnya penting untuk mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia,” tandasnya.

Menteri Johnny berharap dengan hadirnya layanan Aduan ASN melalui situs aduanasn.id dapat membuat para ASN bekerja dengan lebih nyaman dan dapat meningkatkan kinerjanya. “Ini semuanya disediakan hanya untuk satu kepentingan, yaitu kenyamanan bagi keseluruhan keluarga besar ASN dan bagi peningkatan kinerja dan *key performance indicator* bagi seluruh ASN,” pesannya.



Tangkal Radikalisme

Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan ide dibentuknya layanan Aduan ASN muncul karena keprihatinan atas masalah radikalisme dan intoleransi di kalangan ASN. “Ada keprihatinan mengenai masalah radikalisme, intoleransi, dan lain-lain di kalangan ASN,” kata Wahyu Atmaji.

Menurut Sesmen PANRB, sebelum adanya fasilitas aduanasn.id ketika menangani kasus radikalisme atau intoleransi di kalangan ASN, dirinya harus menghubungi secara langsung pihak dari kementerian/lembaga untuk melakukan klarifikasi atas laporan yang masuk.

“Saya bersyukur dengan adanya layanan Aduan ASN maka penanganan berbagai

laporan dapat ditangani dengan lebih sistematis, komprehensif, dan cermat. Saya mengapresiasi kerja keras Kementerian Kominfo yang telah menyiapkan layanan ini sehingga mempermudah penanganan berbagai aduan dari masyarakat,” ungkapnya.

Dalam acara itu berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Kominfo dan perwakilan dari 10 kementerian/ lembaga, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.



KOMINFO DORONG RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PENYIARAN JADI PRIORITAS 2020

Jakarta, Kominfo – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

“Komisi I DPR RI bersepakat dengan Kemkominfo untuk memasukkan sebagai RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2020 untuk pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Data Pribadi,” jelas Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viafa Hafid dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kominfo di Gedung Nusantara II Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (05/11/2019).

Menurut Meutya Hafid, kedua RUU tersebut diperlukan guna mengatur berbagai hal strategis terkait perkembangan teknologi dan migrasi penyiaran digital dan kejahatan penyalahgunaan data pribadi. “Terkait RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI bersepakat dengan Kemkominfo untuk membahas draft RUU tersebut selambat-lambatnya pada awal tahun 2020,” tegasnya.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan perlindungan data pribadi menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang tengah disempurnakan draftnya akan dikirimkan ke DPR RI akhir tahun ini.

“Kita harapkan Desember ini, Draft RUU sudah bisa diserahkan dan bisa masuk dalam pembahasan di Badan Legislatif untuk jadi prioritas 2020. Kita akan berdiskusi dengan Komisi I untuk memastikan tersedianya waktu yang cukup untuk proses legislasi dua RUU yang bisa dilakukan secara serentak di waktu yang bersamaan,” ungkap Menteri Johnny.

Sejak awal memimpin Kementerian Kominfo, Menteri Johnny menyatakan RUU PDP dan revisi UU Penyiaran bakal menjadi prioritas lembaga yang dipimpinnya. “Hanya saja, draf RUU PDP masih perlu direvisi oleh Kominfo setelah dikoreksi oleh Kemendagri dan Kejawang pada pertengahan Oktober lalu,” jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo, RUU PDP sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan data masyarakat. “Pemerintah sangat berkepentingan untuk memastikan hak setiap warga negara terlindungi dan bisa dijalankan dengan baik. Apabila RUU perlindungan data pribadi masuk ke dalam prolegnas 2020 dan Prolegnas 2020-2024. Saya minta yang terhormat komisi I agar UU menjadi prioritas diselesaikan dalam waktu cepat,” jelasnya.

Menteri Johnny menambahkan, RUU Perlindungan Data Pribadi akan dibahas di lingkup legislatif sekitar enam bulan, yakni Januari hingga Juli 2020. Selanjutnya, beleid ini ditargetkan keluar dan disahkan menjadi undang-undang pada Oktober 2020. Dalam RUU Data Pribadi, Kementerian Kominfo mengusulkan adanya standarisasi aturan yang secara prinsip menjamin keamanan data masyarakat. Selain itu, beleid bakal mengatur tata-kelola terhadap proses perlindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Menurut Menteri Johnny, Kominfo perlu mendorong terbitnya RUU Perlindungan Data Pribadi lantaran saat ini aturan data pribadi di Indonesia masih acak dan tersebar di berbagai jenis beleid. “Karena itu kita perlu undang-undang yang mensinkronkan perlindungan data pribadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menkominfo Johnny memastikan bahwa Kementerian yang dipimpinnya telah bertemu dengan berbagai pihak untuk menggelar studi terkait sistem perlindungan data pribadi. Salah satunya delegasi perwakilan Uni Eropa. Dari hasil pertemuan itu, Menteri Kominfo

menemukan fakta bahwa dari 180 negara di dunia, 126 di antaranya sudah memiliki sistem perlindungan yang mumpuni

Lebih lanjut, Menteri Johnny menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan soal kedaulatan data juga harus terlindungi.

“Saat ini data-data termasuk data pribadi warga negara itu tersebar di banyak aturan dan undang-undang, sangat sektoral dan parsial. Kita inginkan untuk melakukan kompilasi ini di dalam satu undang-undang,” jelasnya.

Regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saat uji Kominfo terus mendorong agar beleid itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Nanti kalau memang itu bisa kita lakukan tentu kita perlu menempatkannya di dalam prolegnas prioritas di DPR RI dan Prolegnas prioritas 2020-2024,” pungkasnya.

PENGAWASAN KONTEN

Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo juga memaparkan upaya menangkal konten hoaks dengan pendekatan tiga lapisan. “Lapisan kedua adalah pemeriksaan konten. Lapisan ketiga adalah pengawasan konten. Kominfo menggunakan infrastruktur dan sistem tertentu untuk menangani konten bermuatan negatif,” jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo, Tim AIS juga bekerja secara terus menerus selama 24 jam secara serius. “Kami menjamin bahwa civil rights dan civil obligation dimana Kominfo memastikan dengan jajarannya dilakukan dengan baik. Pengawasan konten di internet dilakukan secara terus menerus, secara tepat dan cerdas bagi pemanfaatan oleh masyarakat dan negara,” jelasnya.

Menurutnya pada tahun 2020 akan ada sebuah sistem untuk menangani 150.000 konten negatif internet. “Kalau tidak diawasi dengan benar tentu akan berdampak pada masyarakat kita,” ungkapnya.

DIRJEN APTIKA:

KEPASTIAN HUKUM DOKUMEN ATAU TRANSAKSI BER-TTE TERJAMIN

Jakarta, Kominfo – Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Indonesia dapat menghemat ribuan hingga ratusan ribu ton kertas, jika dokumen digital masif diterapkan. Menurutnya, pemanfaatan dokumen digital dengan sendirinya dapat menyelamatkan hutan-hutan di Indonesia dari kepunahan.

Selain menyelamatkan hutan Indonesia dari kepunahan dengan cara mengurangi produksi kertas, transaksi elektronik juga sangat dipercaya karena user atau nama pengguna teridentifikasi secara akurat. Menurut Dirjen Samuel, sertifikasi dan tanda tangan elektronik tentunya memiliki banyak manfaat dan kemudahan, baik bagi pemerintah maupun swasta.

“Transaksi elektronik juga menjadi sangat dipercaya apabila penggunaan tanda tangan elektronik, di mana user dapat diidentifikasi secara akurat menggunakan aplikasi. Dengan tanda tangan elektronik, user tidak bisa lagi menyangkal telah melakukan transaksi elektronik,” imbuhnya

Penerapan tanda tangan elektronik, lanjutnya, juga dapat menangkal kejahatan siber yang semakin tinggi saat ini. “Kejahatan siber semakin canggih dan sulit dideteksi, dengan tanda

tangan elektronik mampu mencegah masuknya user yang tidak berhak ke dalam sistem elektronik kita,” ungkapny

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan dokumen atau transaksi yang memiliki tanda tangan elektronik (TTE) menandakan jaminan kepastian hukum dengan adanya persetujuan pengguna dan tidak ada pihak yang dapat menyangkal bukti tersebut.

“Dengan tanda tangan elektronik, user tidak bisa lagi menyangkal telah melakukan transaksi elektronik,” kata Dirjen Samuel saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam acara *Launching Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Promosi Tanda Tangan Elektronik* di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Dirjen Aptika menjelaskan fitur nirsangkal tersebut akan memberikan suatu kepastian hukum sehingga dokumen atau transaksi elektronik bisa dijadikan bukti yang otentik di mata hukum sehingga akan memberikan manfaat pada berbagai pelayanan pemerintah, keuangan, dan swasta.

Dirjen Samuel menekankan modus kejahatan di dunia maya semakin canggih sehingga teknik otentikasi pengguna menggunakan username, password, maupun OTP sudah tidak efektif lagi.

“Penggunaan username, password, dan OTP sudah tidak cukup lagi, kejahatan cyber semakin canggih dan sulit dideteksi,” jelasnya.

Pemerintah, menurut Dirjen Aptika sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang penyediaan layanan penyelenggara sertifikat elektronik.

Menurut peraturan tersebut Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menyediakan 6 jenis layanan yaitu tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, preservasi tanda tangan dan segel elektronik, serta otentikasi situs web.

Dirjen Semuel menegaskan seluruh layanan tersebut harus tersedia untuk menjamin keamanan transaksi di era ekonomi digital saat ini. "Semua layanan tersebut di atas untuk menjamin ekonomi digital yang sedang dibangun agar

aman dari pemalsuan dokumen dan akses yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Di Indonesia saat ini telah ada enam Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang terdiri dari dua instansi pemerintah dan 4 swasta yaitu BSSN, Peruri, PrivyID, VIDA, Digisign, dan iOTENTIK.

Dirjen Semuel berharap pemanfaatan tanda tangan elektronik akan lebih menjamin keamanan dan kepastian hukum pada dokumen dan transaksi elektronik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Acara itu dihadiri oleh Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, para perwakilan dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, serta para perwakilan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, BSSN, BPPT, dan TNI.



10 Hoaks Pilihan Miss Lambe Hoaks

1. Gara Gara Wifi Bisa Kena Kanker



 Telah beredar kabar di media sosial Facebook terkait seseorang yang terkena kanker gara-gara Wifi.

 Setelah ditelusuri, faktanya menunjukkan tidak ada hubungan antara pancaran Wifi dengan kanker. WiFi 4G itu paparan radio frekuensi elektromagnetik antara 1900–2100 MHz. Sehingga kini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Wifi dengan kanker darah, kata konsultan senior hematologi dari Parkway Cancer Centre Singapura, Colin Phipps Diong, lewat surel keLiputan6.com.

2. Jokowi Nilai Positif Jabatan Presiden Diusulkan Tiga Periode



 Laman merdekaind.blogspot.com diketahui telah memuat sebuah artikel berjudul "Jokowi Nilai Positif Jabatan Presiden Diusulkan Tiga Periode, "Sangat Bagus". Judul artikel itu menunjukkan bahwa ada komentar Presiden RI Joko Widodo terhadap wacana penambahan periode kepemimpinan jabatan Presiden Indonesia.

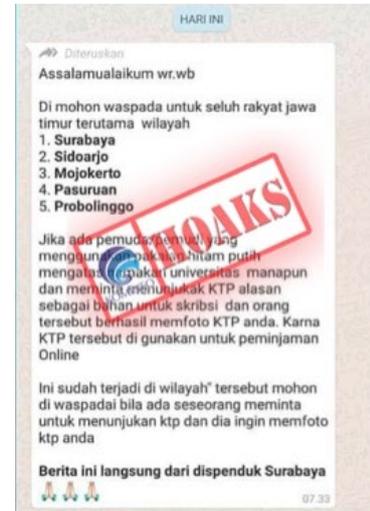
 Faktanya, setelah ditelusuri tidak ada pernyataan Presiden Jokowi dalam artikel yang dimuat merdekaind.blogspot.com tersebut. Adapun artikel itu menyadur pemberitaan lain yang memuat pernyataan pengamat Intelijen Suhendra Hadikuntono terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

3. Kerusuhan Suporter Bola di Malaysia, WNI Indonesia Meninggal Dunia karena Ditusuk



-  Beredar di media sosial Facebook informasi mengenai pendukung Indonesia dipukuli, ditangkap, dan ditusuk sampai mengakibatkan salah satu suporter meninggal dunia saat menyaksikan pertandingan Pra-Piala Dunia antara Indonesia vs Malaysia di Stadion Bukit Jalil, Malaysia.
-  Dilansir dari bola.kompas.com Kepala Fungsi Konsuler KBRI KL, Yusron Ambardi menegaskan bahwa kabar mengenai suporter atau WNI yang meninggal karena ditusuk itu tidak benar atau Hoaks.

4. Imbauan Dispenduk Surabaya Tentang Kasus Penyalahgunaan KTP



-  Beredar pada Platform WhatsApp sebuah pesan berantai berupa himbauan kepada masyarakat Jawa Timur terkait modus penyalahgunaan E-KTP untuk pinjaman online yang dilakukan oleh pelaku yang berpura-pura sebagai Mahasiswa. Informasi tersebut diklaim berasal dari Dispenduk Surabaya..
-  Faktanya informasi berupa pesan berantai tersebut tidak memiliki sumber yang kredibel dan bukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Surabaya. Pihak DISPENDUKCAPIL Surabaya menghimbau agar masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut dan tetap berhati-hati dalam menerima berita atau himbauan yang mengatasnamakan OPD Pemerintah Surabaya.



5. Rumah Sakit Condong Catur Sleman Yogyakarta Dijual



Sebuah akun di media sosial Facebook mengunggah foto sebuah Rumah Sakit yang diklaim sebagai Rumah Sakit Condong Catur Sleman, Yogyakarta dengan keterangan bahwa Rumah Sakit tersebut dijual.



Menanggapi hal itu, pihak RS Condong Catur memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala Unit Humas dan Pemasaran RS Condong Catur, Yustina Ernawati menjelaskan bahwa hoaks RS Condong Catur hendak dijual sudah tersebar sejak beberapa tahun lalu. Erna menghimbau masyarakat tidak mempercayai kabar hoaks itu. Ia juga memastikan pelayanan RS Condong Catur tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh adanya kabar bohong tersebut.

**miss
lambe
pusing
dibuatnya**

6. Harga BBM Nonsubsidi Naik

| Jenis | Harga Terbaru (per liter) | Harga Sebelumnya (Per liter) |
|------------------|---------------------------|------------------------------|
| Pertamax | Rp 9.850 | Rp 10.200 |
| Pertamax Turbo | Rp 11.200 | Rp 12.000 |
| Pertamina Dex | Rp 11.700 | Rp 12.500 |
| Pertamax Premium | Rp 7.400 | Rp 6.550 |
| Pertamax Special | Rp 7.350 | Rp 7.800 |
| Dexlite | Rp 10.200 | Rp 10.300 |
| Bio Solar | Rp 9.800 | Rp 9.800 |

Sumber : www.pertamina.com



Telah beredar di media sosial, sebuah gambar terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi. Gambar tersebut menampilkan harga BBM sebelum naik dan harga terbarunya.



Faktanya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman menyatakan bahwa kabar yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks, karena sejauh ini pihak Pertamina belum ada rencana menaikkan atau menurunkan harga BBM.



7. Microsoft E-Mail Service untuk Meninjau Pesan yang Tidak Terkirim



Beredar adanya Pesan yang berasal dari "Microsoft E-Mail Service", yang memberitahukan bahwa kita dapat mengklik tombol "Review Messages" untuk meninjau pesan yang tidak terkirim.



Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya itu hanyalah modus penipuan yang dirancang untuk membajak akun email Anda. Penjahat sekarang dapat menggunakan kredensial login yang Anda kirimkan untuk mendapatkan akses ke akun email Anda dan layanan terkait apa pun seperti penyimpanan file online atau toko aplikasi. Berhati-hatilah dengan email yang mengklaim bahwa Anda harus mengklik tautan atau membuka file terlampir untuk menangani masalah akun yang seharusnya.

8. BMKG "Global warming 2019-2022", Jika Benar Tahun Ini Maka Dajjal Tidak Lama Lagi Akan Keluar



Beredar sebuah video bertajuk kemarau panjang akan melanda dunia 2019-2022 dengan judul "BMKG "Global warming 2019 2022", Jika Benar Tahun Ini Maka Dajjal Tidak Lama Lagi Akan Keluar".



Faktanya, informasi yang disampaikan tidak benar, karena BMKG tidak memprediksikan kekeringan panjang bertahun-tahun, pun pada tahun 2020 tidak teridentifikasi akan terjadi el-nino kuat. Lembaga NOAA dan NASA (Amerika) serta JAMSTEC (Jepang) memprediksikan hasil yang serupa. El nino lemah tahun 2019 telah dinyatakan berakhir pada akhir Juli lalu dan kondisi netral masih berlanjut hingga akhir tahun 2019. Hal tersebut menandai tahun 2020 nanti diperkirakan tidak ada potensi anomali iklim yang berdampak pada curah hujan di wilayah Indonesia. Sampai saat ini BMKG juga belum mendeteksi adanya anomali iklim yang dapat menyebabkan kekeringan di tahun 2020 ataupun tahun 2021.



9. Terpidana Kasus Korupsi Leo Lim, Anggota DPRD DKI dari PSI



Sebuah akun di media sosial Facebook membagikan sebuah artikel berita terkait kasus korupsi yang menjerat Leo Lim dengan narasi yang menyebutkan bahwa Leo Lim sebagai anggota DPRD DKI dari PSI.



Faktanya, Kokos Leo Lim bukanlah anggota DPRD DKI dari PSI, Terpidana korupsi Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim adalah Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (PT TME). Kokos terlibat kasus korupsi dalam perjanjian kerjasama antara PT PLN Batubara dengan PT TME terkait izin pengadaan batubara untuk keperluan PLN. Leo Lim juga bukan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

10. Mahfud MD Akan Jemput Rizieq Shihab ke Arab Saudi



Diunggah oleh salah satu akun Facebook, sebuah informasi yang memberikan keterangan bahwa (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menjemput Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Arab Saudi unggahan tersebut menyertakan link artikel yang diunggah olehtribunind.blogspot.com dengan judul "Mahfud MD: Jika Tidak Ada Yang Jemput Guru Saya, Biar Saya Saja Yang Jemput HRS".



Faktanya berdasarkan penelusuran diketahui bahwa artikel pada unggahan tersebut merupakan hasil suntingan dari artikel berita yang diunggah media daring onlinejitunews.com dengan judul "Disebut Akrab dengan Habib Rizieq, Ini Kata Mahfud MD". Dan diketahui pula bahwa situstribunind.blogspot.com tidak memiliki sumber yang kredibel. Adapun klaim mengenai Menko Polhukam Mahfud MD akan menjemput HRS pada unggahan tersebut adalah tidak benar.



SAMPAIKAN INFORMASI PUBLIK, KOMINFO BERUPAYA TINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT

Jakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo mengatakan, Kementerian Kominfo melalui Ditjen IKP memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terutama terkait program-program pemerintah.

Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Menurut Widodo, pada periode pemerintahan kedua Joko Widodo, pemerintah menginginkan agar informasi tiap-tiap program kementerian ataupun lembaga, bisa sampai dipahami masyarakat.

“Karena masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Widodo melalui Tayangan Program TokTok

Kominfo, di Jakarta, Rabu (26/11/2019).

“Di sinilah peran Kominfo. Bagaimana menjalankan fungsi *Government Public Relations* (GPR). Khusus di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, kita akan banyak menguatkan pada komunikasi publik itu bisa berjalan,” paparnya.

Lebih lanjut Dirjen Widodo menjelaskan, komunikasi publik yang dijalankan oleh Ditjen IKP menjadi sarana pendidikan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program-program pemerintah.

“Itu bisa menjadi sarana pendidikan, bisa menjadi sarana untuk memahamkan publik terhadap berbagai kegiatan pembangunan. Sampai pada





Jakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo mengatakan, Kementerian Kominfo melalui Ditjen IKP memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terutama terkait program-program pemerintah.

Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Menurut Widodo, pada periode pemerintahan kedua Joko Widodo, pemerintah menginginkan agar informasi tiap-tiap program kementerian ataupun lembaga, bisa sampai dipahami masyarakat.

“Karena masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Widodo melalui Tayangan Program TokTok Kominfo, di Jakarta, Rabu (26/11/2019).

“Di sinilah peran Kominfo. Bagaimana menjalankan fungsi *Government Public Relations* (GPR). Khusus di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, kita akan banyak menguatkan pada komunikasi publik itu bisa berjalan,” paparnya.

Lebih lanjut Dirjen Widodo menjelaskan, komunikasi publik yang dijalankan oleh Ditjen IKP menjadi sarana pendidikan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program-program pemerintah.

“Itu bisa menjadi sarana pendidikan, bisa menjadi sarana untuk memahamkan publik terhadap berbagai kegiatan pembangunan. Sampai pada bagaimana supaya tidak terjadi ketidakpahaman terhadap niat baik bangsa Indonesia dibawah pemerintahan Pak Jokowi dan KH Ma’ruf ini,” ujarnya

Guna memaksimalkan peran Kominfo sebagai GPR, Dirjen IKP mengatakan bahwa penyediaan akses informasi melalui berbagai jenis *platform* media lebih dimasifkan. Kominfo saat ini telah memiliki 11 media.

“Kita banyak melakukan kegiatan komunikasi media yang kita miliki, kita punya lebih dari 11 media, baik media sosial, elektronik maupun Media TV. Program saya dalam waktu dekat ini adalah mengkonsolidasi semua media itu,” tuturnya.

Sosialisasikan Program Pemerintah, Kominfo Siapkan Media Khusus

Widodo mengungkapkan, dari 11 media internal yang dimiliki Kominfo saat ini, salah satu fungsinya untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada publik.

Melalui Program TokTok Kominfo, dirinya menjelaskan bahwa dari berbagai jenis media baik media sosial, online, elektronik, dan media cetak milik pemerintah ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi dan membangun literasi media.

“Tugas kita ini bagaimana mengedukasi, membangun literasi media kepada masyarakat yang sudah tercampur oleh teknologi internet,” katanya.

Dirjen IKP menyebutkan, salah satu media yang dikelola Kementerian Kominfo adalah GPR TV dengan menggunakan teknologi parabola. “Kita punya GPR TV yang juga media TV-nya pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian lembaga, dan itu melalui antena parabola. Viewers-nya (jumlah pengunjung) itu sekitar 36 juta. Jadi cukup banyak untuk bisa masuk di daerah-daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Widodo menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Informasi dan Informasi Publik (Ditjen IKP) juga diberikan kewenangan untuk mengkonsolidasi semua informasi di kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo juga menyediakan forum-forum diskusi. Salah satunya Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), yang membahas isu-isu terbaru terkait dengan kebijakan pemerintah.

“Kita punya forum FMB9, itu adalah panggungnya para pimpinan-pimpinan kementerian lembaga untuk bisa kita amplifikasi, sebarluaskan melalui jejaring kita,” imbuhnya.





Direktur Jenderal IKP, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, membuka Rapat Koordinasi Nasional Urusan Informasi dan Komunikasi Publik Tingkat Provinsi “Kebijakan Strategis Kementerian Kominfo Periode 2020-2024 Dalam Mendukung 5 Fokus Pembangunan Nasional” di Jakarta, Jumat (06/12/2019).

AS ONAL ORMASI DAN PUBLIK



asi Publik | Kementerian Informasi Publik







Dirjen Widodo menyematkan PIN *Government Public Relations* pada Kepala Dinas Kominfo yang hadir dalam Rakornas Urusan IKP Tingkat Provinsi, Jumat (06/12/2019), sebagai bentuk komitmen dan diharapkan mampu membangkitkan motivasi, inovasi dan kreasi dalam penyebaran dan pengembangan informasi dan komunikasi.



Dirjen IKP Widodo Muktiyo menegaskan Kominfo harus kreatif dan inovatif dalam penyebaran informasi, guna menerapkan strategi penguatan yang seimbang antara informatika dan komunikasi dengan media yang terbuka luas. Hal ini ia sampaikan saat membuka Rakornas Urusan IKP Tingkat Provinsi, Jumat (06/12/2019) di Jakarta.

URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2019

MILLENNIUM 2019



m omunikasi Publik | Kemente ... si dan





FMB9

Informasi, Data, Dan



FORUM MERDEKA BARAT 9

Data Value Narasumber Terpercaya



Dirjen IKP Widodo Muktiyo, Dirut Bakti Kemkominfo Anang Latif, VP Media dan Digital PT Telkom Indonesia Asli Brahma, VP Ruang Guru Ritchie Gunawan, dan CEO Aruna Farid Naufal Aslam hadir sebagai narasumber dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 “Pemerataan Berbasis Ekonomi Digital” di Jakarta, Kamis (31/10/2019).



Seiring upaya pemerataan ekonomi digital di seluruh pelosok negeri, Kemkominfo akan terus meningkatkan program literasi media online agar penggunaan teknologi internet tidak disalahgunakan. Hal ini disampaikan Dirjen Widodo Muktiyo dalam FMB9 “Pemerataan Berbasis Ekonomi Digital” di Jakarta, Kamis (31/10/2019).



www.fmb9.go.id



FMB9.ID



FMB9ID_



FORUM MERDEKA BARAT 9

Informasi Akurat, Data Valid dan Narasumber Terpercaya

Berbasis Ekonomi Digital

KAMIS, 10 OKTOBER 2019

Antakupa Lt Gedung Belakang Kemkominfo
Medan Merdeka Barat 9 Jakarta Pusat



DIREKTUR UTAMA BAKTI

VICE PRESIDENT MEDIA
AND DIGITAL PT TELKOM



ASTON BOGOR HOTEL & RESORT

25 - 26 N...

Bogor Nirwana Res...
Jl. Dreded P...



KUMPUL MEDIA •••• 2019

NOVEMBER 2019

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Prof. DR Widodo Muktiyo, memaparkan Peran *Government Public Relations* kepada rekan-rekan jurnalis dalam acara Kumpul Media 2019 di Bogor, Senin (25/11/2019) malam.



LITERASI PEREMPUAN

Apa itu *Cyberbullying* dan Bagaimana Mengajari Anak Menghindarinya?

Hai Sisters! Dalam rangka Hari Ibu, Sisternet ingin mengingatkan kepada semua ibu tentang bahaya *cyberbullying*, nih. Karena sekarang ini hampir semua orang punya media sosial, dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak sekalipun sudah mahir menggunakannya. Jika anakmu termasuk yang aktif menggunakan media sosial, sebaiknya terus perhatikan dan pantau mereka dalam menggunakan akun media sosialnya, ya. Palsanya, saat ini banyak yang menyalahgunakan media sosial. Sehingga tak sedikit anak-anak dan remaja jadi sasaran *cyberbullying*. Sebagai orangtua, pasti kamu sangat cemas dan tak terima jika anakmu mengalami hal tersebut, kan?

Contoh *cyberbullying* yang pernah terjadi adalah kasus pada Amanda Todd. Remaja asal Kanada itu memilih mengakhiri hidupnya karena tidak tahan mendapat *bully*. Amanda Todd diteror dan diancam secara terus menerus dengan cara menyebarluaskan foto-foto pribadi, saat remaja itu terpengaruh ajakan seseorang yang baru dikenalnya lewat dunia maya untuk berfoto dewasa.

Lalu, apakah sih sebenarnya *cyberbullying* itu?

Cyberbullying merupakan bentuk tindak kejahatan atau perlakuan kasar yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang kepada orang lain dengan menggunakan perantara media elektronik atau media online.

Tak hanya dalam ranah dunia maya, efek *cyberbullying* juga akhirnya merambat ke dunia nyata hingga ke lingkungan sekolah dan keluarga yang akhirnya menjadi tekanan dan memberi dampak depresi.

Mengapa *cyberbullying* bisa terjadi?

Pada umumnya, korban yang mengalami *cyberbullying* adalah remaja. Saat ini jarang sekali kamu bisa menemukan remaja yang tidak memiliki akun jejaring sosial, bahkan sejak mereka bayi mungkin sudah dibuatkan.

Usia remaja biasanya terjadi krisis identitas dan lebih menyukai lingkungan di luar keluarga. Banyak ingin tahu dan mudah terpengaruh oleh tren masa kini, seperti berfoto selfie dan mem-posting harta benda untuk menarik perhatian orang lain. Ketahuilah, hal ini menjadi cikal bakal *cyberbullying*, terutama pada anak yang masih mudah dipengaruhi.

Bagaimana upaya pencegahan *Cyberbullying*?

Melarang anak untuk tidak memiliki akun jejaring sosial mungkin akan sangat sulit, terlebih kita juga tidak dapat menutup mata bahwa saat ini jejaring sosial juga menjadi sebuah wadah untuk mempermudah komunikasi antar keluarga, dan teman-teman di sekolah.

Oleh karena itu, kamu harus memberikan pengawasan dan aturan-aturan saat anak ingin bermain jejaring sosial dan mem-posting foto-fotonya. Namun jika anak sudah terlanjur menjadi korban *cyberbullying*, kamu harus bantu mengatasinya agar anak tidak menjadi depresi dan mengambil tindakan yang berbahaya, Sisters. Jangan pernah menambahkan kesalahan anak dengan ikut menyalahkannya. Percayalah, hal ini sama sekali tidak menolongnya.

Lalu, bagaimana orangtua harus bersikap ketika terjadi *cyberbullying* pada anak?

1. Tak perlu menanggapi pelaku

Berikan pengertian pada si kecil bahwa hal utama yang harus dilakukan ketika kekerasan di media sosial terjadi padanya adalah tidak membalas atau menanggapi si pelaku. Beri tahu bahwa semua komentar negatif atau cercaan yang ditujukan pada dirinya sebaiknya diabaikan saja, Sisters.

Meski memang sangat sulit untuk menahan diri agar tidak melawan, justru hal ini akan mencegah keadaan semakin buruk. Biasanya orang yang melakukan *cyberbullying* cenderung lebih senang jika 'umpannya' diterima oleh sang korban.

2. Bangun kembali kepercayaan diri anak

Sangat wajar jika anak dan remaja sangat ketakutan, cemas, marah, dan sedih dalam waktu yang bersamaan. Tentu sebagai orangtua, peranmu untuk membuatnya tenang dan mengembalikan kepercayaan dirinya kembali sangat penting, Sisters.

Jelaskan bahwa hal ini bisa saja terjadi pada siapa pun. Ada banyak orang yang tak bertanggung jawab dan menggunakan media sosial untuk menindas orang lain. Jika memang perlu, kamu bisa mengajak si kecil ke psikolog untuk memantau kondisi mentalnya.



Penting untuk tidak menyudutkan atau menyalahkan anak, misalnya dengan berkata seperti, "Memangnya apa yang kamu lakukan, sampai-sampai dia mem-bully kamu seperti ini?". Apa pun alasannya, *cyberbullying* pada anak tidak bisa dibenarkan, Sisters.

3. Kumpulkan bukti, lalu laporkan

Setelah berhasil menahan diri, tanyakan si kecil apa saja bentuk kekerasan media sosial yang ia dapatkan. Entah itu komentar yang tidak pantas, foto pribadinya, dan lain-lain. Kumpulkan semua hal tersebut untuk dijadikan barang bukti, Sisters.

Banyak anak yang justru menghapus semua bukti tersebut karena merasa

ketakutan. Jadi tenangkan dirinya dan berikan penjelasan bahwa hal ini bisa dijadikan barang bukti. Jika memang kamu sudah memiliki bukti yang cukup, maka sebaiknya laporkan pada pihak sekolah atau pihak manapun yang berwenang dalam situasimu, sehingga si pelaku tidak akan melakukan kekerasan pada anak lainnya.

Hal yang terpenting adalah memantau segala kegiatan si kecil dalam media sosial. Ketahui apa saja akun media sosial yang ia miliki hingga teman-temannya di dalam media tersebut. Beritahukan ia jika sebaiknya tidak berteman dengan orang-orang yang tidak dikenal olehnya. Penting juga untuk mengetahui segala postingan yang ia unggah di akun pribadinya.

Sanksi hukum terhadap pelaku *cyber-bullying*

Nah, melihat dari bagaimana hal itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

Berikut selengkapnya bunyi Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014:

Pasal 80 UU 35/2014:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

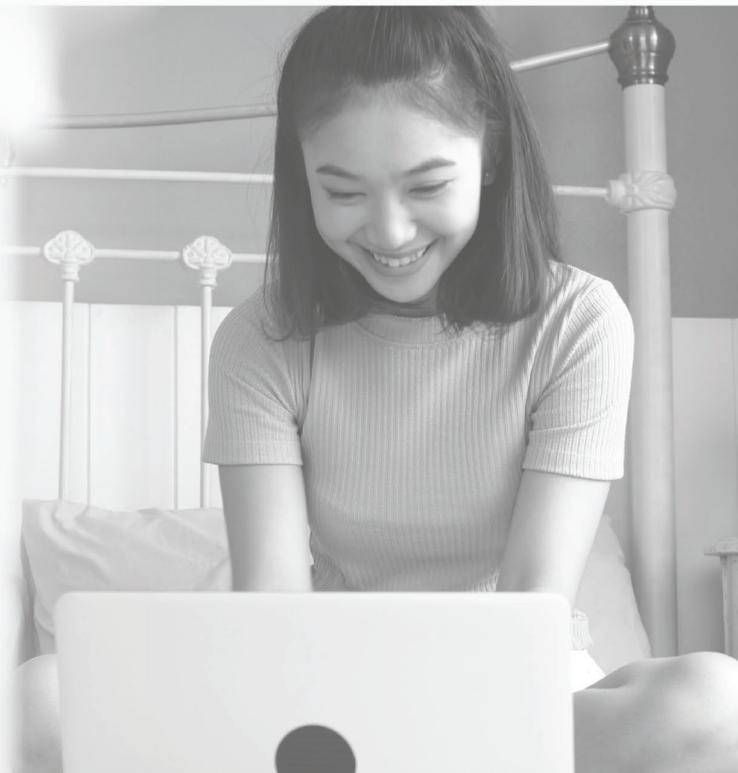
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76C UU 35/2014:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Mengingat ada pasal yang bisa menjerat pelaku bullying, berarti kasus tersebut memang tidak bisa dipandang sebelah mata, ya, Sisters. Untuk itu, jika kamu mengetahui ada dugaan tindak bullying kamu bisa melaporkannya kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>, telepon ke 021-57903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929.

Semoga anak-anak kita dijauhkan dari apapun bentuk bullying ya, Sisters, dan Selamat Hari Ibu untuk para Ibu di seluruh Indonesia!



LINTAS KOMINFO NOVEMBER 2019

Kali Kedua, Kominfo Raih Penilaian Badan Publik Informatif

Tahun 2019 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mendapatkan penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Indonesia (KIP). Penganugerahan keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi informatif ini juga sebelumnya sudah didapatkan Kementerian Kominfo pada tahun 2018 yang lalu.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti yang didampingi Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana. "Memberikan informasi kepada publik adalah sebuah kewajiban dari badan publik. Keterbukaan dan transparansi bagi badan publik untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya," ungkapnya dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Komisi I DPR dan Kominfo Sepakat Prioritaskan Pembahasan RUU PDP dan RUU Penyiaran

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, kedua RUU tersebut diperlukan guna mengatur berbagai hal strategis terkait perkembangan teknologi dan migrasi penyiaran digital dan

kejahatan penyalahgunaan data pribadi. "Terkait RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI bersepakat dengan Kemkominfo untuk membahas draft RUU tersebut selambat-lambatnya pada awal tahun 2020," tegasnya.

Kunjungi Kominfo, Delegasi UKM Lao PDR Diskusikan Startup dan Digitalisasi UMKM

Sepuluh orang Delegasi Republik Rakyat Demokratik Laos (Lao PDR) berkunjung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bertukar informasi mengenai penguatan dan pengembangan startup digital dan digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Dipimpin Deputy *Director General*, Department of SME Promotion (DOSMEP), Ministry of Industry and Commerce, Mr. Sa Siriphong, delegasi Laos diterima Plt. Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, I Nyoman Adhiarna.

Tujuan study visit pemerintah Laos ini untuk mempelajari program pengembangan UKM di Indonesia sebagai bahan untuk menyusun National SME Service Center di negara. "Program ini merupakan bagian dari ASEAN SME Service Center yang dibangun bekerja sama dengan konsultan asal Jerman Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit (GIZ)," tutur Mr. Sa Siriphong.

PP PSTE Beri Dasar Hukum Kuat Pemerintah Kejar Pelanggar di Luar Negeri

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan menegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dengan didukung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk mengejar para pelanggar aturan yang ada di luar negeri.

"Perusahaan yang ingin beroperasi di Indonesia harus sudah mendaftar. Ada ketentuan dan sanksinya. Kalau dia tidak mendaftar ya kita blokir. Dengan adanya aturan ini semua jadi lebih jelas. Kalau ada kasus yang kita perlu akses tapi tidak diberikan ya kita tutup

walaupun belum tentu tutup semua. Kita punya kemampuan itu,” tegasnya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 “Ada Apa Dengan PP No.71 Tahun 2019 (PP PTSE)” di Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Percepat Gerakan 100 Smart City, Kominfo Bangun 3.447 BTS pada 2020

Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana membangun lebih banyak infrastruktur pendukung guna mendorong percepatan Gerakan 100 Smart city. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut salah satu bentuk dukungan tersebut melalui pembangunan BTS dan persiapan peluncuran satelit multifungsi.

Langkah itu diambil untuk mendukung terlaksananya program pembangunan Kota Cerdas (*Smart city*) di Indonesia. “Di samping *existing*, Kominfo juga sudah lakukan pembangunan *backbone* serat optik Palapa Ring, juga membangun BTS di wilayah Indonesia yang belum terjangkau. Total kami targetkan 5.000 BTS, kini sudah ada 1.500 BTS untuk tahun ini dan kami akan menambah 3.447 BTS lagi pada 2020,” ujar Menteri Johnny dalam acara Gerakan Menuju 100 Smart city di Jakarta, Rabu (06/11/2019).



Menkominfo: ASN Garda Terdepan Agenda Kebangsaan

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menegaskan bahwa tugas aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya sebagai mesin penggerak roda pemerintahan. Lebih dari itu, para abdi negara wajib mendukung jalannya agenda kebangsaan. “ASN dituntut memberikan kontribusi kepada negara. (Sebagai) Garda terdepan dari dukungan atas jalannya politik bangsa dan negara kita adalah para ASN,” kata Johnny di acara *Launching* *aduanasn.id* dan Penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurutnya, peran strategis ASN yakni didukung oleh SDM yang mempunyai keterampilan, *skill knowledge* serta *scientific* yang memadai. “Tetapi juga didukung dengan semangat kebangsaan, nasionalisme yang tinggi, budi pekerti, etika dan humaniora yang memadai. Hadirnya ini semuanya dalam rangka memastikan ASN kita menjadi ASN yang unggul,” imbuhnya.

Sosialisasikan Manfaat Radio Maritim, Kominfo Dorong Nelayan Sadar Frekuensi

Salah satu manfaat penggunaan radio maritim adalah melindungi para nelayan dari terjadinya bencana saat tengah melaut. Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dwi Handoko menyatakan manfaat lain adalah mendukung komunikasi antarnelayan tanpa mengganggu layanan telekomunikasi lain, seperti penerbangan.

“Ada dua manfaat. Pertama, bagaimana nelayan melindungi diri sendiri di laut dengan berkomunikasi secara benar apabila terjadi bencana atau bahaya. Kedua, nelayan dalam berkomunikasi tidak mengganggu jalur komunikasi lain, seperti penerbangan. Dalam berkomunikasi menggunakan frekuensi radio harus secara benar sesuai aturan, agar tidak saling mengganggu,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam Maritime on the Spot (MOTS) di Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/11/2019).

Gandeng Ruangguru, BAKTI Kominfo Latih 103 Guru Kabupaten Sorong

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Ruangguru memberikan pelatihan online sehari kepada 103 guru Kabupaten Sorong dalam Program Indonesia Teaching Fellowship (ITF) di Aquarius Hotel Aimas, Sorong, Kamis (31/10/2019). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Kepas Kalasuat, mengapresiasi kegiatan dan berharap kepada para peserta (guru) untuk mengikuti materi ini dengan baik.

Menurutnya, tujuan program itu untuk memajukan pendidikan nasional melalui pelatihan pengajaran untuk guru-guru yang sudah terpilih di Kabupaten Sorong. "Pelatihan meliputi kompetensi di bidang strategi pembelajaran, perencanaan kurikulum, manajemen pendidikan berbasis pembelajaran digital. Seluruh bidang kompetensi tersebut disampaikan melalui video belajar, kuis, dan uji coba yang dapat diakses pada Aplikasi Belajar Ruang guru," jelasnya.

Layanan Digital Tak Lagi Butuh Bukti Fisik dan Saksi Visual

Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Riki Arif Gunawan menyatakan saat ini cara melakukan validasi pengguna di industri e-commerce dan perbankan masih mengadopsi cara manual. Padahal, dalam layanan digital menurutnya tidak lagi membutuhkan bukti fisik dan saksi visual.

"Seperti yang biasa dilakukan secara offline diantaranya dengan meminta data berupa scan KTP, foto selfie, dan membubuhkan tanda tangan di tablet atau ponsel. Regulasi manual ini dipaksakan untuk mengatur regulasi digital padahal tidak bisa," kata Riki dalam acara *Launching Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Promosi Tanda Tangan Elektronik* di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019). Dengan adanya sertifikat elektronik, lanjutnya, segala transaksi atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik oleh suatu pihak dapat dipastikan akan menjadi tanggung jawab pihak yang menandatangani secara elektronik tersebut.

Balmon Bandung Musnahkan 56 Perangkat Ilegal Hasil Penertiban 10 Tahun

Pertama kali dalam sepuluh tahun terakhir, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung (Balmon Bandung) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Informasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika memusnahkan 56 barang bukti penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi ilegal.

"Dilakukannya pemusnahan barang bukti ini dalam rangka tertib penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Diharapkan memberikan efek jera kepada masyarakat pengguna frekuensi radio dan perangkat ilegal" kata Kepala Balmon Bandung Zainuddin Kalla di Bandung, Kamis (14/11/2019). Menurut Zainuddin Kalla, barang bukti itu terkumpul dari kegiatan penertiban sejak tahun 2009 berupa Exciter Radio sebanyak 46 unit, Radio Komunikasi atau HT tiga unit, STL Link satu unit, dan Penguat Signal enam unit.

Pajak Platform Digital Bisa Bangun Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebutkan *platform* digital yang beroperasi di Indonesia harus menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Salah satunya dengan membayar pajak digital. *Platform* digital seperti Facebook, WhatsApp dan Netflix yang beroperasi di Indonesia, punya andil bagi pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Oleh karena itu, Menteri Johnny minta setiap *platform* untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

"Kita harapkan, mari kita diskusikan sama-sama sehingga antar kewajiban dan hak-hak mereka atau bisnis mereka yang berkembang itu bisa berjalan secara baik," kata Menteri Kominfo Johnny di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Mungkin banyak orang tak merasakan, namun Kominfo sejatinya adalah salah satu kementerian yang paling depan dalam membangun infrastruktur. Hanya saja memang infrastruktur yang kita bangun kadang tak kasat mata

*Menkominfo
Johnny G Plate*

